

**UPAYA RESILIENSI DALAM GERAKAN NKRI
BERSYARIAH PASCA PEMBUBARAN FPI**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

HAKAM ABDILLAH JABBAR

E91216054

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

NAMA : HAKAM ABDILLAH JABBAR

NIM : E91216054

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 April 2022

A handwritten signature in black ink is written over a green and purple revenue stamp. The stamp is a 'METERAI TEMPEL' (Revenue Stamp) for 6000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', 'B5E5FAEF345293347', '6000', and 'ENAM RIBURUPIAH'.

HAKAM ABDILLAH JABBAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Upaya Resiliensi Dalam Gerakan NKRI Bersyariah Pasca Pembubaran FPI” yang ditulis oleh Hakam Abdillah Jabbar ini telah disetujui untuk diajukan

Surabaya, 13 April 2022

Pembimbing



Dr. Anas Amin Alamsyah, M. Ag

NIP. 197004292005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "UPAYA RESILIENSI DALAM GERAKAN NKRI BERSYARIAH PASCA PEMBUBARAN FPI" yang telah ditulis oleh Hakam Abdillah Jabbar ini telah diuji di depan Tim penguji pada tanggal 19 Mei 2022

Tim Penguji

1. Drs. Tasmuji M. Ag



2. Dr. Anas Amin Alamsyah, M. Ag



3. Muchammad Helmi Umam, M. Hum



4. Fikri Mahzumi, S. Hum., M. Fil. I



Surabaya, 08 Juli 2022



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D

197008132005011003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hakam Abdillah Jabbar
NIM : E91216054
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : hakamabdillah21@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

UPAYA RESILIENSI DALAM GERAKAN NKRI BERSYARIAH PASCA PEMBUBARAN

FPI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

(Hakam Abdillah Jabbar)

ABSTRAK

Tulisan ini berbicara tentang bagaimana resiliensi Front Pembela Islam (FPI) dalam mengawal gerakan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyariah (NKRI Bersyariah) pasca dibubarkannya organisasi tersebut. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis sebagai pisau daam membedah problem akademis yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) FPI pasca dibubarkan tetap tidak pernah merubah sedikitpuun orientasi pemikiran dan gerakannya dalam mewujudkan NKRI Bersyariah; (b) Resiliensi FPI mewujud dalam organisasi barunya yang tetap menggunakan nama FPI (Front Pemersatu Islam) dan tetap teguh dengan ideologi sedia kala; (c) FPI baru beserta perjuangannya tanpa harus berlindung di bawah hukum pemerintah merupakan representasi perjuangan dan resiliensi FPI dalam bentuk lain.

Kata kunci: Front Pembela Islam, Resiliensi, Teori Konflik

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian	14
I. Teknik Analisis Data	17
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II RESILIENSI DAN KONFLIK SOSIAL DALAM KANCA POLITIK NASIONAL	20
A. Pengertian Teori Konflik	20
B. Pengertian Konflik Sosial	21
C. Bentuk-Bentuk Konflik Sosial	23
D. Konflik Sosial dalam Konteks Politik dan Ideologi	26
E. Biografi Ralf Dahrendorf	29
F. Teori Konflik Ralf Dahrendorf	31

G. <i>Resiliensi</i>	34
BAB III EKSISTENSI NKRI BERSYARIAH PASCA PEMBUBARAN FPI.....	37
A. Latar Belakang Berdirinya FPI.....	37
B. Format Kepemimpinan dan Struktur Organisasi FPI.....	41
C. Visi Misi Front Pembela Islam Pasuruan	47
D. Paham Keagamaan Front Pembela Islam (FPI)	48
E. Kiprah FPI di Tanah Air.....	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA RESILIENSI DALAM GERAKAN NKRI BERSYARIAH MENURUT PERSPEKTIF TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF	59
A. FPI dan NKRI Bersyariah	59
B. FPI <i>Vis a Vis</i> Pemerintah.....	62
C. Dari Front Pembela Islam ke Front Persatuan Islam (FPI): Wadah Baru Perjuangan NKRI Bersyariah.....	64
D. Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf Terhadap Upaya Resiliensi Gerakan NKRI Bersyariah FPI.....	67
BAB V PENUTUP	71
E. Kesimpulan	71
F. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75
.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

NKRI Bersyariah adalah ideologi salah satu organisasi Islam di Indonesia. Konsep ini mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki banyak agama, sedangkan konsep NKRI Bersyariah adalah konsep yang menjunjung tinggi syariat agama Islam dan hendak menerapkan Islam *kaffah* di Indonesia. Konsep NKRI Bersyariah dianggap bertentangan dengan semboyan negara Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. NKRI Bersyariah cenderung memaksakan atau menganggap bahwa ajaran agama yang paling sempurna dan paling tepat diterapkan adalah Islam, sedangkan agama lain tidak tepat.¹ Oleh sebab itulah konsep tersebut banyak mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh FPI yaitu *nahi munkar*, FPI melakukan beberapa tindakan kekerasan dengan alasan mencegah kemungkaran.² FPI mengajak agar masyarakat Indonesia lebih menerapkan syariat agama Islam secara sempurna, salah satunya dengan mencegah kemungkaran.

FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Jakarta.³ Sedangkan mulai masuk di Pasuruan pada tanggal 25 April 2015 tepatnya di Pondok Pesantren

¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), 28.

² Ibid.

³ Al-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI* (Yogyakarta: PT LkiS Priniting Cemerlang, 2013), 89.

Attahzib, Lekok Pasuruan. FPI dianggap sebagai organisasi yang bertolak belakang dengan peraturan pemerintah dan selalu menolak aturan pemerintah. Oleh sebab itulah, keberadaan FPI di Indonesia mendapat banyak penolakan hingga akhirnya FPI dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2021. Selama FPI berdiri di Indonesia, sudah banyak kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh FPI. Sejarah mencatat berdirinya FPI tidak bisa lepas kaitannya dengan tiga peristiwa besar, yakni Kerusuhan Ketapang, Sidang Istimewa MPR dan Pembentukan organ paramiliter Pengamanan (Pam) Swakarsa. Rentetan ketiga peristiwa tersebut adalah lanjutan dari gelombang demonstrasi Reformasi 1998 yang bergulir sejak Mei 1998. Bahkan sampai waktu sebelum FPI dibubarkan, FPI terus aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang tidak jarang kontras dengan pemerintah, masyarakat dan ormas-ormas serupa lainnya.⁴

Bahkan, beberapa tahun terakhir aksi massa FPI yang cukup monumental adalah aksi 411 dan aksi 212. Aksi 411 perihal pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) eks Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016 tentang ungunya di Kepulauan Seribu yang dinilai menistakan agama Islam.⁵ Adapun aksi 212 atau Aksi Damai 2 Desember 2016 merupakan aksi lanjutan dari 411 yang menuntut kembali Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama dan masih banyak lagi aksi-aksi sosial keagamaan FPI yang kerap kali menimbulkan resah di masyarakat seperti aksi *sweeping* terhadap tempat-tempat

⁴ Muslim, "Gerakan Sosial Keagamaan FPI (Front Pembela Islam)", *AJIQS*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019), 90.

⁵ Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar, [Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan Halaman all - Kompas.com](http://www.kompas.com). Diakses pada 7 Maret 2022.

maksiat dan penggerebekan-penggerebekan lainnya yang menurut mereka adalah aksi berantas maksiat (penegakan amar ma'ruf nahi munkar).

Dari berbagai aksi sosial keagamaan FPI sebagaimana telah disebutkan, di situlah nama FPI cukup familiar dan berpengaruh, walaupun masih terdapat pro-kontra di tengah masyarakat perihal aksi-aksi FPI tersebut. FPI banyak mencuri perhatian masyarakat. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa FPI adalah organisasi radikal dan bertentangan dengan ideologi negara Indonesia hingga pada akhirnya FPI dinilai tidak sejalan dengan nafas NKRI yang berujung pada pembubaran organisasinya. Terdapat beberapa alasan pembubaran FPI oleh pemerintah diantaranya, *Pertama*, FPI dianggap bertentangan dengan UU No. 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat yang seharusnya menjunjung tinggi ideologi Pancasila. *Kedua*, isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI bertentangan dengan pasal 2 UU Ormas. *Ketiga*, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 01-00-00/010/D/III/4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 Tentang Surat Keterangan Terdaftar FPI sebagai ormas hanya berlaku sampai 20 Juni 2019, dan sampai saat itu habis, FPI belum melakukan perpanjangan SKT. Oleh karenanya, mulai tanggal 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar dengan sendirinya.

Faktanya, pasca pembubaran FPI di Indonesia, FPI tidak benar-benar membubarkan diri. FPI tetap ada di Indonesia hanya saja berganti nama menjadi Front Pemersatu Islam. Nama tersebut dicetuskan hanya berjarak beberapa jam pasca dibubarkannya FPI oleh pemerintah Indonesia, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2020. Salah satu tokoh penggerak FPI, yaitu Aziz menegaskan bahwa

pergantian nama tersebut tidak merubah struktur organisasi tersebut, namun nama tersebut adalah kendaraan baru untuk perjuangan umat Islam. Konsep NKRI Bersyariah yang sangat identik dengan FPI pun dipertanyakan, apakah konsep ini tetap dipertahankan atau mengalami perubahan. Hal ini perlu dipertanyakan mengingat konsep tersebutlah yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila yang ada di Indonesia.

Pondok pesantren Darullughah Wadda'wah (Dalwa), adalah salah satu pondok pesantren yang ada di Pasuruan Jawa Timur. Banyak sekali kalangan yang berpendapat bahwa alumni Dalwa banyak bergabung pada organisasi FPI. Oleh sebab itulah, penelitian ini dilakukan di pondok pesantren tersebut, guna mencari kebenaran mengenai hal tersebut. Selain itu, alasan penelitian ini dilakukan guna mencari kebenaran pasca pembubaran FPI, konsep yang dipakai tetap atau mengalami perubahan, jika tetap bagaimana penjabaran konsep tersebut pada saat ini. Namun, jika berubah, penelitian ini akan menjawab konsep yang dipakai oleh FPI pada saat ini.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas, maka terdapat beberapa identifikasi masalah dan batasan masalah yang nantinya akan memandu fokus pembahasan dalam penelitian ini. Identifikasi dan batasan masalah yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Islam *kaffah*
2. Konservatisme
3. Radikalisme agama

4. Nahi munkar
5. Gerakan FPI
6. Konsep NKRI Bersyariah dan
7. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Dengan luasnya permasalahan sebagaimana teridentifikasi di atas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah yang akan difokuskan mulai dari poin lima hingga poin ketujuh, yaitu Gerakan FPI beserta konsep NKRI Bersyariah yang digagas sebagai solusi untuk Indonesia yang lebih religius dan teori konflik Ralf Dahrendorf sebagai pisau analisis dari penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan batasan penelitian yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana eksistensi konsep NKRI Bersyariah pasca pembubaran FPI di Indonesia?
2. Bagaimana resiliensi yang dilakukan oleh FPI untuk kembali bangkit pasca pembubaran?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang eksistensi konsep NKRI Bersyariah pasca FPI di bubarkan oleh pemerintah Indonesia.
2. Menjelaskan resiliensi yang dilakukan oleh FPI guna bangkit dan mengembalikan keadaan pasca pembubaran.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dalam dua aspek, yakni:

1. Secara teoritis, maka penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang membutuhkan informasi atau hendak melakukan penelitian yang membahas mengenai FPI atau agama dan politik.
2. Secara praktis, maka penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kewaspadaan dan kesadaran bersama agar lebih hati-hati dalam menghadapi dan menyikapi sebuah gerakan, terlebih gerakan ormas-ormas yang berbasis agama. Baik pemerintah, politisi dan rakyat sipil dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan mampu menangkal berbagai macam wacana pemikiran dan gerakan ormas-ormas yang berpotensi memecah belah umat dan persatuan NKRI.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian sebagai telaah atau ajuan saat melakukan penelitian ini. Penelitian mengenai FPI bukanlah hal baru yang dilakukan oleh akademisi, oleh sebab itu ada beberapa acuan atau penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian ini, di antaranya yaitu:

No	Nama	Judul	Diterbitkan	Temuan Penelitian
1	Nabih Amer	Analisis Pembubaran	Gorontalo : Jurnal Legalitas.	Penelitian ini menjelaskan tentang

		Organisasi Masyarakat dalam Perspektif Negara Hukum.		perlindungan organisasi masyarakat dan hak yang ada di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas alasan dibubarkannya organisasi FPI yaitu organisasi FPI dianggap bertentangan dengan nilai pancasila, selain itu FPI juga sering melakukan provokasi dalam demo.
2	Iqbal Maula	Pandangan Muhammad Rizieq Shihab tentang Pancasila.	Bandung : Hanifiya : Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 2, No. 2, 2019	Penelitian ini membahas pandangan Rizieq Shihab selaku pendiri FPI tentang pancasila, selain itu juga akan membahas ideologi yang dipakai oleh FPI yakni NKRI Bersyariah.
3	Abel Herdi	Relasi Islam	Jakarta:	Penelitian ini

	Desman Putra	dan Pancasila dalam Pemikiran Habib Rizieq bin Husain Shihab.	Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019	membahas tentang hubungan ideologi NKRI Bersyariah sebagai ideologi FPI dengan nilai Pancasila.
4	Emanuel Raja Daimatu	Wewenang Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat.	Jember : e-Jurnal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 3, 2017.	Jurnal ini menjelaskan mengenai peraturan pemerintah tentang organisasi masyarakat, selain itu juga menjelaskan wewenang yang boleh dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi masyarakat. Salah satu wewenang pemerintah adalah melakukan pembubaran jika dirasa organisasi masyarakat tersebut mengganggu

				berjalannya roda pemerintahan.
5	Nailul Hikam Amalia	Pandangan Barisan Ansor Serbaguna Gresik mengenai Konsep NKRI Bersyariah Front Pembela Islam (dalam Perspektif Kritik Ideologi Max Horkheimer)	Skripsi Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuludin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya	Penelitian ini melakukan pembuktian bahwa pemuda sangatlah mudah untuk disusupi ajaran radikal. Organisasi yang dianggap radikal disini adalah FPI dengan konsepnya NKRI Bersyariah. Pemuda dianggap sebagai sasaran yang gampang disusupi paham radikal. Oleh sebab itulah penelitian ini dilakukan pada Pemuda AnSOR guna melihat paham agama yang mereka pegang dan untuk membuktikan apakah paham FPI telah masuk

				ke dalam generasi muda.
6	Syafitri Irwan	Islam dan Politik Identitas: Studi tentang Pemahaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam	Jurnal Medina-Te, Vol. 15, No. 2, 2019	Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai sejarah munculnya FPI di Indonesia dan pemikiran FPI. Arah penelitian ini adalah untuk membuka pesan-pesan yang sebenarnya hendak dibawa oleh FPI ketika masuk ke Indonesia. Dengan mengetahui pesan yang hendak dibawa oleh FPI, maka kita dapat mengetahui apakah FPI bertentangan dengan ideologi Pancasila ataukah tidak.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terhadap FPI adalah penelitian ini akan membahas mengenai keadaan FPI pasca

dibubarkannya gerakan tersebut. Pada penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai langkah-langkah FPI pasca pembubarannya. Karena pembubaran FPI bisa dikatakan belum lama, jadi kasus ini termasuk kasus yang masih baru. Oleh sebab itulah penelitian ini jelas berbeda. Jika penelitian sebelumnya hanya membahas gerakan dan ideologi FPI, maka penelitian ini akan sangat berbeda.

G. Kerangka Teori

Untuk mencapai target penelitian, suatu penelitian haruslah memiliki acuan teori. Penelitian kali ini akan menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori konflik adalah antitesis dari teori struktural fungsional. Jika teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan, sebaliknya teori konflik adalah teori yang mengedepankan konflik dalam pembahasannya. Teori konflik menggunakan konflik sebagai aturan sistem sosial. Masyarakat tidak selamanya dalam suatu keteraturan, oleh sebab itulah teori ini dianggap lebih relevan dalam kehidupan. Dalam teori konflik, terdapat dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat.⁶ Dalam teori konflik juga terdapat otoritas yang dibagi menjadi superordinasi dan subordinasi.

Teori konflik dianggap perlu dalam masyarakat karena dapat menimbulkan perubahan dalam masyarakat yang lebih baik. Dengan adanya konflik dalam masyarakat, maka akan tercipta peraturan baru yang dapat membawa perubahan yang lebih baik. Teori konflik melihat bahwa dalam suatu masyarakat akan terdapat kepentingan-kepentingan. Namun dengan adanya

⁶ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern" *Jurnal al Hikmah*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2017), 39.

konflik kepentingan tersebut mampu menciptakan kesepakatan bersama. Teori konflik menjelaskan bahwa masyarakat disatukan dengan paksaan atau koersi, namun dengan paksaan tersebut masyarakat dapat menciptakan suatu perubahan.

Ralf Dahrendorf sendiri merupakan seorang sosiologi Jerman yang tidak puas dengan teori struktural fungsional. Dahrendorf diawal karyanya menerjemahkan tulisan Karl Marx tentang teori kelas dalam bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh masyarakat Amerika pada tahun 1957-1958 saat ia berkunjung kesana.⁷ Menurut Dahrendorf, masyarakat memiliki dua sisi yaitu sisi konflik dan sisi kerjasama. Menurut Dahrendorf, teori dalam masyarakat harus dibagi dua bagian yaitu konflik dan konsesus karena masyarakat tidak selamanya stabil dan tentram, pasti akan ada konflik dalam tubuh masyarakat. Konflik juga tidak seterusnya dapat dianggap sebagai suatu hal yang negatif, karena berawal dari konflik juga dapat menimbulkan ketentraman baru. Teori konflik harus menguji kepentingan yang terdapat dalam diri masyarakat.

Dahrendorf sangat terpengaruh oleh teori fungsionalisme. Pemikiran teori konflik selalu berbanding terbalik dengan teori fungsionalisme. Menurut Dahrendorf, masyarakat dipersatukan oleh ketidakbebasan yang mereka rasakan. Berbeda dengan teori fungsionalisme yang mengatakan bahwa masyarakat bersatu dengan kebersamaan. Masyarakat bersatu karena merasa tidak bebas dan ingin mendapatkan kebebasan. Ketidakbebasan yang dipaksakan untuk dilakukan oleh masyarakat inilah yang sebenarnya terjadi dan menjadikan masyarakat bersatu. Kekuasaan dan otoritas dalam diri masyarakat menjadikan masyarakat atau

⁷ Ibid',

kelompok lain harus tunduk, keadaan inilah yang dimaksud bahwa masyarakat bersatu karena ketidakbebasan. Konflik yang dikarenakan kepentingan kelompok akan ada setiap saat dan tidak dapat dihindarkan.

Dahrendorf memaparkan bahwa dalam masyarakat terdapat tiga kelompok, yaitu kelompok semu yaitu kelompok yang memegang posisi atau kekuasaan. Kedua yaitu kelompok kepentingan yaitu kelompok yang memiliki kepentingan dalam sosial maupun politik. Ketiga yaitu kelompok konflik, kelompok yang sengaja dimunculkan oleh kelompok yang memiliki kepentingan.⁸

Di akhir penelitiannya, Dahrendorf menjelaskan adanya hubungan antara konflik dengan perubahan sosial. Konflik yang terjadi dalam diri masyarakat nantinya akan memunculkan kesepakatan baru dalam diri masyarakat yang dapat menciptakan keteraturan baru. Konflik tidak selamanya negatif, pasca konflik akan muncul hal-hal positif yang dapat membangun masyarakat.

Konflik tentulah terjadi antara dua kelompok atau bahkan lebih. Konflik yang biasa terjadi dalam suatu negara biasanya adalah konflik yang meminta kebebasan. Sesuai teori yang disampaikan oleh Dahrendorf bahwa masyarakat hidup dalam paksaan dan ketidakbebasan, mereka akan bersatu dan memunculkan konflik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akan ada kelompok yang dianggap sebagai pemicu konflik yaitu kelompok yang menginginkan pembebasan dan ada pula kelompok yang menolak pendapat tersebut, yaitu kelompok yang memiliki kedudukan atau berkuasa dalam suatu masyarakat.

⁸ Ibid',

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini menjelaskan kondisi secara nyata keadaan yang ada di lapangan.⁹ Penelitian kualitatif dirasa cocok untuk mengetahui keadaan FPI saat ini, karena penelitian yang bersifat kualitatif akan menarasikan fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan dengan penjelasan berupa gambaran kata-kata naratif walaupun peneliti terjun secara langsung di lapangan. Penelitian ini juga biasa dianggap sebagai *natural setting* yaitu penelitian yang hasilnya ditulis secara nyata, yakni keadaan di lapangan tanpa ada penambahan dan pengurangan dari penulisnya.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan menuliskan secara nyata keadaan yang terjadi pada tubuh organisasi FPI setelah dibubarkan oleh pemerintah.

Sedangkan untuk pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah penelitian yang melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara nyata tanpa ada penambahan dari peneliti.¹¹ Sesuai dengan deskripsinya, penelitian ini akan membahas segenap fenomena atau gerakan yang terjadi dalam tubuh FPI pasca pembubarannya oleh pemerintah.

⁹ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 18.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana dapat dimnegerti seperti berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang utama dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data atau fakta yang didapat peneliti ketika terjun langsung di lapangan.¹² Data primer adalah data yang didapatkan dari pihak yang bersangkutan, yaitu dari anggota atau simpatisan FPI. Selain data lapangan yang didapat melalui wawancara dengan anggota atau simpatisan FPI, penulis juga menyangdingkan data-data primer yang didapat dari perpustakaan seperti buku yang berjudul *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI* karya Al-Zastrouw (2013), *Mengenal Front Pembela Islam: Sejarah, Tujuan, dan Gerakan (Analisis Perspektif Pancasila, UUD 1945, dan Teori Hukum)* karya Yusuf Al-Qardhawy Al-Asy (2018) dan buku yang berjudul *Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkar* karya Al-Habib Muhammad Rieziq bin Husein Syihab (2008).

b. Data Sekunder

¹² Samuel, "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian", <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>, Diakses pada 05 November 2021.

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang terdapat dalam penelitian ini.¹³ Sumber data sekunder meliputi data dari penelitian terdahulu atau sumber informasi lain yang menjelaskan tentang FPI, baik yang bersumber dari wawancara maupun dari buku-buku, artikel, jurnal ataupun pemberitaan media massa dan media online yang dikarang atau yang diinformasikan oleh pihak ketiga yang berbicara seputar FPI beserta gerakan-gerakannya. Lebih detail, data-data sekunder dalam penelitian ini ada di antaranya beberapa buku yang related dengan topik pembahasan, di antaranya: Hitam Putih FPI (Front Pembela Islam): Mengungkap Rahasia-Rahasia Mencengangkan Ormas Keagamaan Paling Kontroversial yang ditulis oleh Andri Rosyadi (2008), Khazanah Aswaja karya Abdurrahman Navis, dkk., (2016), *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* karya A Rubaidi dan *Kritik Ideologi Radikal* karya Alfanul Makky, dkk., (2018).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat secara langsung keadaan yang terjadi di lapangan. Observasi sendiri dibagi menjadi dua yaitu partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang mengharuskan peneliti mengikuti setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh objek penelitian. Sedangkan non partisipan adalah penelitian yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan

¹³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 209.

tanpa harus mengikuti setiap agenda objek penelitian. Nantinya, penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipan. Peneliti akan terjun ke lapangan dan mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh FPI, namun peneliti tidak turut serta dalam kegiatan tersebut. Peneliti akan mengamati, mencatat dan menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh FPI.

Selanjutnya yaitu teknik dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa buku, artikel, jurnal, majalah dan pemberitaan media massa maupun media online yang sesuai dengan topik bahasan yang ada dalam penelitian ini. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diklasifikasi sesuai kebutuhan peneliti.

I. Teknik Analisis Data

Adapun mengenai teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis fenomenologi karena objek yang diteliti adalah sebuah gerakan sosial-keagamaan yang ada di dalam tubuh organisasi FPI. Dengan analisis tersebut penulis berupaya untuk menganalisis secara deskriptif dan introspektif mengenai segala macam bentuk kesadaran manusia beserta pengalamannya baik dalam aspek inderawi, konseptual, moral, estetis dan religius. Data-data yang sudah berhasil dikumpulkan, baik data historis maupun data-data pendukung lainnya yang berhubungan dengan topik utama penelitian akan dianalisis dengan cara penulis melakukan interpretasi yang diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan pisau analisis dari teori konflik Ralf Dahrendorf, teori ini digunakan sebagai pisau analisis guna untuk melihat bagaimana upaya resiliensi FPI setelah dibubarkan oleh pemerintah, wacana

pemikiran dan dinamisme gerakan yang berdampak pada perubahan-perubahan sosial akan dilihat melalui teori tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam tulisan ini, laporan penelitian akan disusun secara sistematis dalam bentuk bahasan bab. Berikut ini adalah uraian bab demi bab:

Bab Pertama: membahas seputar pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, teknis analisis data hingga uraian tentang sistematika pembahasan bab demi bab.

Bab Kedua: mengurai kajian teoritis yang di dalamnya meliputi pembahasan: pengertian konflik sosial, bentuk-bentuk konflik sosial, biografi Ralf Dahrendorf beserta teori konflik yang digagas olehnya.

Bab Ketiga: Membahas tentang historisitas Front Pembela Islam (FPI), wacana pemikiran, gerakan sosial keagamaan, konsep NKRI Bersyariah yang digagas oleh FPI dan latar belakang dibubarkannya organisasi tersebut.

Bab Keempat: berisi kajian analisis, yakni analisis terhadap bagaimana upaya resiliensi Front Pembela Islam (FPI) dalam menegakkan konsep NKRI Bersyariah menurut perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf setelah organisasi tersebut dibubarkan oleh pemerintah Indonesia.

Bab Kelima: Menyajikan secara singkat mengenai kesimpulan dari penelitian ini sekaligus menjawab rumusan masalah. Kemudian pada bab ini pula akan penulis sajikan saran guna untuk membangun kritik dan masukan konstruktif

untuk penulis dan untuk peneliti selanjutnya yang hendak mengembangkan pembahasan yang ada dalam penelitian ini secara lebih luas dan lebih komprehensif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

RESILIENSI DAN KONFLIK SOSIAL DALAM KANCA POLITIK NASIONAL

A. Pengertian Teori Konflik

Teori sendiri merupakan alat yang berhubungan secara sistematis dengan fenomena dengan menunjukkan variabel-variabel guna menunjukkan prediksi.¹⁴ Teori disebut juga sekumpulan pernyataan yang logis dan merupakan cermin dari kenyataan yang ada. Teori haruslah terdapat konsep atau *statement* di dalamnya. Harus juga terdapat definisi secara logis yang bisa dipahami. Oleh sebab itu, dalam suatu teori harus terdapat konsep, definisi dan proposisi yang dapat digunakan untuk eksplorasi dan sebagai prediksi. Teori sendiri dapat dikatakan sebagai teori apabila terdapat paradigma, kerangka pikir, konsep dan variabel di dalamnya.

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi akibat penyesuaian nilai atau norma sosial dalam masyarakat. Teori konflik melihat bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena adanya konflik dalam masyarakat. Suatu konflik dalam masyarakat mampu memunculkan kompromi atau peraturan baru yang dapat merubah tatanan atau keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik merupakan teori reaksi dari adanya teori struktural fungsional.

Pemikiran tokoh yang paling berpengaruh dalam teori konflik adalah teori

¹⁴ Sarwoko Sarlito W, *et al.*, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 171.

dari Karl Marx pada tahun 1950 an di Eropa. Teori yang diusung Marx ini menjelaskan kelas sosial dalam masyarakat dan perjuangan kelas tersebut.

B. Pengertian Konflik Sosial

Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah percekocan, perselisihan, atau pertentangan.¹⁶ Dalam kamus sosiologi, konflik adalah pertentangan secara terbuka antar individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam suatu masyarakat atau antara bangsa dengan bangsa lain.¹⁷

Konflik sosial adalah konflik dalam suatu masyarakat sosial yang mengakibatkan suatu perubahan dalam masyarakat. Dalam sistem sosial, konflik adalah hal hal yang tidak dapat dihindarkan. Suatu sistem, pasti ada ketidakcocokan dan tidak selamanya damai atau baik baik saja. Ketidakcocokan inilah yang menimbulkan konflik dalam suatu sistem sosial. Otoritas dalam suatu sistem sosial pasti akan menimbulkan protes yang memicu konflik. Namun konflik tersebut tidak selamanya berupa hal yang buruk. Dalam teori sosial konflik adalah perselisihan yang dapat menciptakan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dengan adanya protes dan konflik, akan tercipta peraturan baru untuk merubah suatu sistem ke arah yang disetujui.

Dalam teori konflik sosial, masyarakat disatukan karena adanya paksaan. Dari paksaan yang terjadi di masyarakat, akan muncul negosiasi yang menjadikan

¹⁵ Ali Agusman M, *Pengantar Konflik Sosial*, (Jakarta: Pustaka Htizam, 2014), 43.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

suatu aturan baru yang akan disepakati. Ada banyak tokoh teori konflik, diantaranya Polybus, Ibnu Khaldun, Nicolo Machiaveli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Karl Marx dan Lewis A. Coser.¹⁸ Beberapa tokoh tersebut dibagi dalam dua kategori pemikiran teori, yaitu teori tokoh klasik dan modern. Tidak ada perbedaan yang begitu signifikan, hanya saja terdapat pembaharuan yang lebih logis. Pemikiran setiap tokoh hampir sama, hanya saja selalu terdapat ciri khas dari tiap tokoh. Contohnya pemikiran Machiaveli yang menjelaskan bahwa manusia yang awalnya hidup bebas namun akhirnya bisa terstruktur dikarenakan konflik yang mengakibatkan mereka menyetujui kesepakatan baru.¹⁹ Manusia yang hidup secara bebas dan terkesan jahat karena mementingkan dirinya sendiri, lambat laun bisa menyadari bahwa mereka membutuhkan orang lain. Konflik dalam diri mereka sendiri inilah yang menciptakan suatu peraturan dan kesepakatan baru. Hampir sama dengan yang disampaikan oleh Thomas Hobbes, hanya saja Hobbes mengemas menjadi tingkatan untuk mendapatkan kekuasaan. Manusia diselimuti dengan keinginan mendapatkan kekuasaan, keinginan ini berlanjut terus menerus dan akan berhenti ketika ia telah masuk liang lahat.²⁰

Setiap tokoh memang memiliki pandangan yang khas dalam mengemukakan teorinya. Sama halnya dengan tokoh teori konflik, meskipun pada intinya mereka setuju bahwa konflik bukanlah suatu hal yang negatif, namun mereka memiliki tatanan bahasa dan penyampaian yang berbeda untuk mengemukakan teorinya.

¹⁸ Soetopo, *Teori Konflik*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1999), 35.

¹⁹ Ibid.

²⁰ George Ritzen, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 29.

C. Bentuk-Bentuk Konflik Sosial

Konflik dalam masyarakat secara garis besar dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu²¹:

1. Berdasarkan Sifat

Bentuk konflik berdasarkan sifatnya digolongkan menjadi dua yaitu destruktif dan konstruktif:

a. Destruktif

Konflik destruktif adalah konflik yang muncul dalam masyarakat karena adanya perasaan tidak senang. Rasa benci dan dendam baik dalam diri individu maupun kelompok, mampu memunculkan konflik destruktif dalam masyarakat. Sesuai dengan namanya destruktif yang berarti merugikan, konflik ini adalah konflik yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Contoh dari konflik destruktif adalah konflik Poso, Sampit, dan konflik Ambon.

b. Konstruktif

Kebalikan dari konflik destruktif, konflik konstruktif adalah konflik yang membangun dalam masyarakat. Konflik ini merupakan konflik fungsional. Muncul karena adanya perbedaan pendapat yang nantinya dapat memunculkan kesepakatan baru. Dengan adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat, maka akan muncul konsensus baru yang merupakan kumpulan dari keluhan dan pendapat masyarakat tersebut.

2. Berdasarkan Posisi Pelaku Konflik

²¹ Lewis A. Coser dan Douglas J. Gootman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), 154.

Jika di dasarkan pada posisi pelaku yang sedang berkonflik, maka konflik terbagi menjadi tiga bagian yaitu konflik vertikal, konflik horizontal dan konflik diagonal.²²

a. Vertikal

Konflik vertikal adalah konflik yang disebabkan oleh individu atau kelompok dalam satu hierarki. Misalnya konflik yang terjadi antar anggota organisasai masyarakat, atau konflik antar organisasi di kampus.

b. Horizontal

Konflik horizontal adalah konflik yang disebabkan oleh individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sama. Misalnya konflik dalam anggota organisasi yang sama.

c. Diagonal

Konflik diagonal adalah konflik yang disebabkan adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi atau kelompok, sehingga memunculkan ketegangan yang ekstrim dalam kelompok tersebut.

3. Berdasarkan Sifat Pelaku Konflik

Berdasarkan sifat para pelaku yang berkonflik, maka konflik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:²³

a. Terbuka

Konflik terbuka adalah konflik yang secara pelakunya secara terang terangan melakukan konflik sehingga dapat diketahui banyak pihak, misalnya konflik Palestina dengan Israel.

²² Ibid.

²³ Ibid.

b. Tertutup

Konflik tertutup adalah konflik yang tidak dilakukan secara terbuka, sehingga tidak diketahui oleh banyak pihak.

4. Berdasarkan Konsentrasi Aktivitas Masyarakat

Jika berdasarkan konsentrasi aktivitas masyarakat, maka konflik dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:²⁴

a. Sosial

Konflik sosial adalah konflik yang dapat terjadi karena perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Konflik sosial dalam masyarakat terbagi menjadi konflik sosial vertikal dan horizontal. Konflik sosial vertikal adalah konflik antara masyarakat dan negara. Konflik sosial horizontal adalah konflik antar golongan atau etnis dalam suatu negara.

b. Politik

Konflik politik adalah konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan politik dalam masyarakat atau negara.

c. Ekonomi

Konflik ekonomi adalah konflik yang terjadi dalam suatu negara karena adanya perebutan kekuasaan sumber daya alam yang dapat menunjang perekonomian.

d. Budaya

Konflik budaya adalah konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan atau perbedaan pendapat tentang budaya dalam masyarakat.

²⁴ Ibid.

5. Berdasarkan Ciri Pengelolaannya

Jika didasarkan pada ciri pengelolaannya, maka konflik dibagai kedalam beberapa bagian yaitu:²⁵

a. Antar Individu

Konflik antar individu adalah konflik yang terjadi akibat perbedaan pendapat antar satu individu dengan individu lain. Konflik ini paling sering terjadi dalam masyarakat. Konflik antar individu terjadi karena ketegangan dan emosi yang tidak dapat dihindarkan.

b. Antar Kelompok

Konflik antar kelompok adalah konflik yang terjadi antara kelompok satu dengan kelompok lain. Hal ini terjadi akibat perbedaan kepentingan atau pendapat antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ketegangan antar kelompok atau antar golongan adalah hal yang biasa terjadi dalam masyarakat.

D. Konflik Sosial dalam Konteks Politik dan Ideologi

Sebagaimana argumentasi Max Weber, bahwa konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi belaka, melainkan juga bisa timbul oleh karena faktor politik, ideologi dan bahkan agama.²⁶ Konflik sosial dalam konteks politik bisa berwujud konflik kolektif yang lebih kompleks, yakni konflik yang melibatkan suatu kelompok dengan kelompok yang lain, organisasi dengan organisasi lain dan komunitas dengan komunitas lain. Jika mengacu pada argumen Weber di atas, maka politik sangat bisa menjadi biang dari pecahnya konflik di tengah masyarakat. Pasalnya, konflik sosial yang

²⁵ Ibid.

²⁶ Baharudin, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Lentera, 2000), 45.

pecah karena faktor politik bermula dari kontroversi-kontroversi abstrak dan umum yang muncul dari berbagai peristiwa politik, kemudian kontroversi tersebut bergerak semakin mengerucut menjadi suatu konflik.²⁷

Konflik sosial politik yang pecah di tengah masyarakat cenderung rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menyelesaikannya, karena konflik sosial yang demikian bertautan langsung dengan politisi, pejabat, pemerintahan, kebijakan dan dalam taraf yang lebih besar adalah negara. Tautan itulah yang menyebabkan konflik sosial yang dipicu oleh faktor politik dikatakan cenderung kompleks dan rumit.²⁸ Adapun konflik sosial dalam konteks ideologi²⁹ bisa dimaknai sebagai konflik yang bermula dari perbedaan-perbedaan ideologi. Sedangkan ideologi sendiri merupakan sebuah ide, gagasan atau pemikiran yang mengkristal di dalam benak pikiran manusia. Ide atau gagasan yang telah mengkristal tersebut bekerja dalam sistem pikiran manusia yang pada akhirnya menggerakkan manusia untuk mewujudkan atau merealisasikan apa yang telah menjadi ide atau gagasan (ideologi) tersebut. Sifat yang menonjol dari ideologi adalah selalu menjadi dambaan dan diikuti oleh banyak orang serta diperjuangkan. Betapa rasional dan ilmiah ide atau gagasan seseorang apabila belum dianut banyak orang dan tidak diperjuangkan, maka ide atau gagasan

²⁷ Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2009), 104.

²⁸ Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik* (Jakarta: DIKTI, 2001), 19.

²⁹ Ideologi sebagaimana umum diketahui, bahwa ia dimaknai sebagai suatu ide atau sistem pemikiran yang ditanam dalam pikiran manusia. Ide dan sistem pemikiran tersebut diperlukan sebagai mitos kehidupan yang tidak jarang dipaksakan untuk orang lain yang mungkin tidak menerima kebenaran ideologi tersebut. Selengkapnya lihat John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*, terj. Haqqul Yaqin (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 17-18.

tersebut belum layak disebut sebagai ideologi.³⁰

Ideologi yang dianut baik oleh individu (perorangan) maupun yang dianut secara kolektif (ideologi kelompok, organisasi, parpol dan sebagainya) tidak selalu sama antar satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya, orang yang berideologi liberal cenderung bebas baik dalam pemikiran maupun tindakannya. Sebaliknya, orang yang berideologi konservatif cenderung mengikat dirinya pada aturan-aturan normatif, tradisional dan ortodoks. Begitu pula dalam beragama, umat beragama yang menganut ideologi moderat akan cenderung bersifat terbuka (inklusif) dalam menjalankan agamanya. Sedangkan umat yang mengenyam ideologi fundamentalis dalam beragama cenderung bersifat tertutup dan tekstual dalam mengejawantahkan ajaran-ajaran agamanya.³¹ Perbedaan ideologi dalam realitas masyarakat yang terwujud dalam unit-unit sosial tertentu pun juga bisa menyebabkan pecahnya konflik sosial.

Pasalnya, konflik sosial yang dipicu oleh ideologi penanganannya jauh lebih rumit daripada konflik sosial yang dipicu oleh faktor politik, kebudayaan, agama dan ekonomi. Karena faktor ideologi lebih tajam dan menukik daripada konflik-konflik sosial yang pecah karena faktor lain. Pasalnya, perang dingin antara Amerika Serikat yang menganut ideologi liberal dan Uni Soviet (sekarang Rusia) yang menganut ideologi Komunis berseteru sekian lama dan saling mempertahankan ideologi masing-masing.³² Begitu pula dengan konflik Timur

³⁰ Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 1.

³¹ Lihat uraian Alamul Huda, "Epistemologi Gerakan Liberalis, Fundamentalis, dan Moderat Islam di Era Modern", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2010), 178-193.

³² Lanskap lebih lengkap lihat Lilik Salamah, "Meninjau Kembali Konflik Perang Dingin: Liberalisme Vs Komunisme", *Jurnal Global dan Strategis*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2008).

Tengah yang sampai hari ini tidak pernah berkesudahan. Pasalnya, konflik yang terjadi di sana adalah konflik ideologis sehingga masyarakat Timur Tengah yang terbelah ke dalam beberapa wilayah tidak pernah bisa bersatu. Ditambah lagi dengan intervensi ideologi demokrasi, liberalisme dan isme-isme lainnya yang semuanya itu datang dari dunia Barat menjadi kontras dengan ideologi Timur Tengah. Agama adalah titik sentral ideologi masyarakat Timur Tengah, sehingga wacana pemikiran dan ideologi yang dinilai tidak sesuai dengan ideologi yang berbasis agama akan ditolak oleh masyarakat Timur Tengah. Begitulah ilustrasi mengenai tajamnya konflik sosial dalam konteks politik terlebih lagi ideologi.³³

E. Biografi Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf merupakan salah satu sosiolog Jerman, ia lahir pada tanggal 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman.³⁴ Ia memiliki nama lengkap Ralf Gustav Dahrendorf, di usianya yang masih belasan tahun, ia mengikuti nazi di Jerman, hal tersebut membuat ia masuk ke dalam dunia politik. Dahrendorf menjadi anggota parlemen di daerahnya dan di Jerman Barat. Pada 1947-1952 ia mempelajari filosofi klasik dan politik di Hamburg. Dia menjadi *Doctor of philosophy* dan masuk dalam kategori 24 anggota honorer yang diterima dan mendapat gelar Ph.D di *London School of Economic*.³⁵ Sejak tahun 1987, dia menjadi kepala di St. Anthony's Collage, Oxford.

Pada tahun 1958-1960 dia berada di Universitas Tubingan, kemudian pada tahun 1966-1969, Dahrendorf mengajar di Universitas Konztan. Kemudian pada

³³ Muhammad Zainal Muttaqin, Ideologi: "Faktor Konflik dan Kegagalan Timur Tengah", *Nation State: Journal of Internasional*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2018).

³⁴ Aniek Rahmaniah, *Teori Konflik Ralf Dahrendorf*, Jurnal Ilmiah, 3.

³⁵ M Wahid Nur Tualeka, *Teori Konflik Sosiologi*, 33.

tahun 1969-1970 ia masuk menjadi keanggotaan *the European Economic Community* di Brussel, Belgium. Selanjutnya pada tahun 1974-1984 ia kembali menjadi profesor ilmu sosial dan menjadi direktur di sekolah tinggi ekonomi di London. Kedudukannya mulai meningkat menjadi pengawas di *St. Antony's Collage Oxford University*.

Dahrendorf seorang tokoh yang cukup terkenal karena teori konflik yang disampaikannya. Ia menyerang pendapat teori fungsionalis strukturalis. Ia menganggap teori tersebut terlalu utopis karena teori tersebut terlalu memfokuskan pendapat pada keseimbangan sosial dan integrasi sosial.³⁶ Sebagai teoritis ia memusatkan perhatiannya terhadap dua hal mengenai konflik yaitu, tentang masyarakat yang dianggap olehnya sebagai hal sosial dan konflik itu sendiri yang dianggap sebagai hal aktif dalam masyarakat.

Dahrendorf merupakan seorang penulis yang ilmu sosial dan politik yang menginspirasi. Ia adalah penghias ksatria perang di Jerman. Ia juga dianugerahi sebagai Baron Dahrendorf oleh Ratu Elizabet II di Westminster, London pada tahun 1993.³⁷ Ia juga pernah mendapat penghargaan dari *Princes of Austria Award* untuk ilmu ilmu sosial tahun 2007. Dahrendorf seorang pemikir sosiologi modern yang dikenal karena teori konflik yang disampaikannya. Ia melakukan penelitian pada masyarakat barat tentang kebebasan orang barat. Karyanya yang paling terkenal adalah *Class and Class Conflic in Industrial Society*.³⁸

Class and Class Conflic in Industrial Society merupakan buku yang berisi

³⁶ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 54.

³⁷ M Wahid Nur Tualeka, *Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*, 33.

³⁸ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 103

rangkuman argumen dan kasus tentang teori konflik. Menurut pandangan kaum fungsionalis, konflik dapat merusak tatanan dalam masyarakat seperti teori yang disampaikan oleh Durkheim.³⁹ Berbeda dengan penganut teori konflik. Konflik tidak selamanya menjadi perusak, namun konflik adalah pola interaksi yang tidak biasa dalam masyarakat. Selain karyanya tersebut, karya lain dari Dahrendorf adalah *the Modern Social Conflict Society* yang terbit pada tahun 1959 dan *Reflection on the Revolution in Europe* yang terbit tahun 1990 di New York.

Dahrendorf merupakan kaum marxian, pemikiran Dahrendorf banyak dipengaruhi oleh Karl Marx. Ia memang banyak menentang teori Karl Marx, namun secara tidak langsung ia menyetujui teori yang disampaikan Karl Marx.⁴⁰ Dahrendorf pada awalnya menganggap bahwa teori konflik merupakan teori yang dapat digunakan untuk menganalisis sosial. Dahrendorf menganggap bahwa masyarakat memiliki dua sisi ganda, yaitu sisi konflik dan kerjasama. Masyarakat tidak seterusnya dapat bekerja sama dengan baik, akan terdapat konflik di dalamnya yang tidak dapat dihindarkan. Struktural fungsional pernah menjadi pendapat yang dominan dalam ilmu sosiologi. Namun ia mampu menjelaskan bahwa konflik sosial merupakan proses dari adanya struktural sosial.

F. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus.⁴¹ Teori konsensus menelaah integrasi sosial dalam diri masyarakat, sedangkan teori konflik kepentingan dan koersi yang dapat

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, 54.

⁴¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, (Jakarta: Kencana, 2006), 154

menyatukan masyarakat di bawah tekanan. Dahrendorf mengatakan bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa adanya konflik, dengan konflik masyarakat dapat memunculkan kesepakatan baru.⁴² Konflik sendiri dapat terjadi karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat, konflik dalam masyarakat tidak mungkin terjadi jika masyarakat tersebut tidak saling berinteraksi. Contohnya, seorang ibu rumah tangga tidak mungkin berkonflik dengan atlet pemain bulu tangkis yang tempat tinggalnya jauh darinya. Ia akan berkonflik dengan tetangga yang sering melakukan interaksi dengannya.

Dahrendorf yang menolak teori struktural fungsionalis mengawali pembahasan teorinya dari penolakannya tersebut. Menurut teori fungsionalis, masyarakat disatukan dengan kerja sama, konsensus atau kesuka rela dalam diri masyarakat.⁴³ Namun sebaliknya, menurut teori konflik, masyarakat disatukan karena adanya tekanan dan paksaan yang harus mereka jalani. Dahrendorf berpendapat bahwa posisi dalam masyarakat memiliki kekuasaan dan otoritas yang dapat memicu terjadinya konflik. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi terletak dalam posisi tertentu, sehingga dapat berubah sewaktu waktu.⁴⁴ Seseorang dengan posisi sebagai pemimpin, memiliki kekuasaan dan otoritas, namun ketika ia tidak lagi menjabat sebagai pemimpin, maka otoritas tersebut dapat pergi dari dirinya. Posisi ini disebut subordinat dengan superordinat. Subordinat adalah masyarakat biasa sedangkan superordinat adalah pemimpin, sehingga subordinat dapat berubah menjadi superordinat, begitupun sebaliknya.

Kekuasaan dalam diri masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu orang yang

⁴² Ibid.

⁴³ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik*, 110.

⁴⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*, 154.

berkuasa dengan orang yang dikuasai. Sehingga, dalam masyarakat terdapat tiga tipe kelompok.⁴⁵ *Pertama*, kelompok semu atau *quasi group*, mereka adalah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, namun belum menyadari keberadaan mereka. *Kedua*, kelompok kepentingan atau *manifest*, yang merupakan kelompok yang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan, kelompok inilah yang selanjutnya mampu memunculkan kelompok selanjutnya. *Ketiga*, kelompok konflik, yang merupakan kelompok dengan kecenderungan untuk berkonflik.

Mereka yang berada di kelompok atas ingin mempertahankan status atau kedudukan mereka, sedangkan mereka kelompok bawah ingin mendapatkan perubahan. Dahrendorf menyetujui pendapat Lewis Coser yang mengatakan bahwa konflik mampu memberikan perubahan.⁴⁶ Dahrendorf menyetujui bahwa konflik mampu menciptakan perubahan bahkan perkembangan yang lebih baik. Konflik sendiri, terjadi dalam masyarakat karena adanya perbedaan kelas dan kekuasaan. Benturan antara si kaya dan si miskin adalah salah satu contoh konflik yang tidak dapat dihindarkan, karena dalam masyarakat tidak semuanya kaya.

Dahrendorf menawarkan suatu variable yang dapat mempengaruhi derajat konflik. Dengan adanya konflik, maka masyarakat akan memunculkan kesepakatan baru untuk memperbaiki kehidupan bersama.⁴⁷ Mengapa hal itu dapat terjadi, karena konflik merupakan bentuk ketidakpuasan dalam diri masyarakat. Mereka meluapkan dengan cara berkonflik. Dengan adanya konflik, maka masyarakat

⁴⁵ Argyo Demartoto, "Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf", https://www.researchgate.net/publication/328980540_Teori_Konflik_Sebuah_Kajian_Menuju_Pemikiran_Ralf_Dahrendorf, Diakses pada 27 Desember 2021.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

akan mencoba untuk memperbaiki dan berdamai dengan konflik tersebut. Oleh sebab itulah, konflik dapat memberikan perubahan dalam keadaan masyarakat.

Dahrendorf sendiri memandang manusia sebagai makhluk abstrak dan artifisial atau yang disebut dengan *homo sociologicus*.⁴⁸ Manusia memiliki dua gambaran yaitu citra ilmiah dan citra moral. Citra ilmiah adalah gambaran manusia dengan sekumpulan peranan yang beragam. Sedangkan citra moral adalah gambaran manusia sebagai makhluk yang unik dan bebas. Konflik kepentingan yang dimaksud oleh Dahrendorf, disebabkan oleh dua hal yaitu manifest dan laten. Kepentingan manifest adalah kepentingan yang disadari atau disengaja. Sedangkan konflik kepentingan laten adalah konflik kepentingan yang tidak disengaja.

Bagi Dahrendorf, konflik adalah bagian dari realitas sosial. Teori konflik dapat dipahami karena masyarakat memiliki dua wajah yaitu tunduk dan berbecah. Masyarakat yang tunduk adalah masyarakat yang menerima aturan dari pemerintah, sedangkan masyarakat yang melakukan perpecahan adalah masyarakat yang berkonflik.

G. Resiliensi

Sebagaimana redaksi judul di atas, bahwa dalam skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana upaya resiliensi FPI dalam mengawal gerakan NKRI Bersyariah pasca dibubarkannya organisasi tersebut. Namun sebelumnya, agar mengena dalam pembahasan perlu kiranya untuk diurai mengenai apa yang dimaksud dengan resiliensi. Pada tahun 1950-an

⁴⁸ Poloma M. Margareth, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), 45.

sosok yang akrab dipanggil Blok memperkenalkan istilah resiliensi untuk pertama kalinya dengan istilah awal *ego-resiliency* (ER), yang memiliki arti “kemampuan umum” yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luwes saat berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu. Istilah resiliensi kemudian mengalami perluasan makna seiring dengan perjalanan waktu, dalam khazanah psikologi, istilah tersebut diartikan sebagai sistem pertahanan dan sebagai proses adaptasi terhadap stres yang meliputi; (a) *compensatory*: melihat resiliensi sebagai faktor yang dapat menetralkan risiko, faktor risiko dan faktor pengganti yang secara independen berkontribusi pada *outcome*; (b) *challenge*: menggunakan faktor risiko sebagai tantangan, misalnya individu yang resilien adalah ia yang mampu memecahkan suatu permasalahan, rasa condong untuk memahami pengalaman sebagai suatu yang positif, bahkan ketika mereka menderita, kemampuan untuk positif pada orang lain, dan keyakinan untuk mempertahankan pandangan hidup yang positif dan (c) *protective factor*: menggunakan faktor risiko untuk beradaptasi, misalnya, individu yang resilien adalah yang optimis, memiliki empati, *insight*, *intellectual competence*, *self-esteem*, serta memiliki ketekunan, tekad dan tujuan tertentu.⁴⁹

Lebih spesifik mengenai istilah resiliensi, *Psychology* Binus menjelaskan; (a) keberhasilan seseorang dalam beradaptasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan (buruk); (b) kapasitas universal dari individu atau kelompok untuk mencegah, meminimalisir, atau bahkan mengatasi efek yang merusak; (c) kemampuan individu dalam mengatasi, melalui, dan kembali pada kondisi semula

⁴⁹ Lihat dalam <https://psychology.binus.ac.id/2020/03/31/mengenal-resiliensi-dalam-ilmu-psikologi/>. Diakses pada 27 Juni 2022.

setelah mengalami kesulitan; (d) sebuah pola adaptasi yang bersifat positif dalam menghadapi kesulitan; (e) kemampuan untuk mempertahankan stabilitas psikologis dalam menghadapi stres; (f) kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan, frustrasi, dan kemalangan; (g) hasil dari adaptasi yang sukses meskipun terdapat situasi yang menantang atau mengancam dan (h) sebuah proses dari hasil adaptasi dengan pengalaman hidup yang sulit (menantang) terutama melalui mental, emosional dan perilaku yang fleksibilitas, baik penyesuaian eksternal maupun internal.⁵⁰ Pendek kata, istilah resiliensi dipergunakan untuk menggambarkan bagaimana seseorang baik secara individu maupun kolektif dalam memproteksi dirinya melawan berbagai macam kesulitan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁰ Ibid.

BAB III

EKSISTENSI NKRI BERSYARIAH PASCA PEMBUBARAN FPI

A. Latar Belakang Berdirinya FPI

FPI adalah organisasi yang lahir sebagai bentuk protes terhadap negara karena melemahnya atau mulai tidak teraturnya sistem hukum dan pemerintahan dalam negara. Secara resmi, FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998, yang bertepatan pada tanggal 24 Rabiuts Tsani 1419 H, yang berlokasi di Pondok Pesanten al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan.⁵¹ Tokoh yang mempelopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Riziq bin Shihab, dengan dihadiri sejumlah tokoh, haba'ib, ulama dan para aktivis. Sebagai bagian dari masyarakat FPI merasa harus memiliki kontribusi dalam masyarakat, oleh karena itu mereka melakukan beberapa kegiatan seperti tabligh akbar.

Sejak awal didirikannya FPI, FPI telah mendeklarasikan sebagai organisasi nasional anti maksiat.⁵² Karena deklarasi tersebut, FPI mendapat banyak kecaman, ancaman bahkan teror dari berbagai kalangan. Tidak berselang lama, pada tanggal 22 november 1998 terjadilah tragedi ketapang. Tragedi ini bermula dari adanya isu tentang perusakan masjid di daerah Ketapang, Gajah

⁵¹ Nailul Hikam Amalia, *Pandangan Barisan Ansor Serbaguna Gresik Mengenai Konsep NKRI Bersyariah Front Pembela Islam*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 17.

⁵² Muhammad Rizieq Shihab, *Dialog FPI- Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Ibnu Saidah, 2008), 90.

Mada, Jakarta Pusat. Isu tersebut membawa FPI untuk meninjau lokasi yang berakhir dengan tragedi berdarah.

Peristiwa selanjutnya terjadi pada tanggal 11 April 1999, pada saat itu terjadi penembakan terhadap Habib Rizieq bin Shihab selaku pendiri dan ketua umum FPI.⁵³ Namun aksi tersebut dapat dihindarkan dan Habib Rizieq bin Shihab pun selamat. Satu tahun berikutnya, tepat pada tanggal 23 Juli 2000 Habib Sholeh al-Attas yang merupakan penasehat DPP-FPI mengalami penembakan di halaman rumahnya. Keesokan harinya, pada tanggal 24 Juli 2000 KH. Cecep Bustomi, yang merupakan deklator FPI diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal saat ia keluar dari markas Grup 1 Kopasus di Serang. Ia dibunuh dengan cara ditembak secara beruntun oleh kelompok tersebut.⁵⁴

Pada tanggal 11 Desember 2000, tepatnya saat menjelang sahur, pihak kepolisian menembaki kelompok monitoring laskar FPI pusat. Penembakan tersebut dilatar belakangi oleh kekecewaan pihak kepolisian karena FPI menyerang lahan setoran judi di wilayah Jakarta Barat. Dua hari setelahnya, tepat pada tanggal 13 Desember 2000, Habib Sholeh al-Habsyi diserang oleh sekelompok preman dan rumahnya dijarah bahkan dibakar, namun ia berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut.

Puncaknya konflik FPI pada acara di SCTV pada malam natal pada tanggal 24 Desember 2000. Presiden RI menyatakan bahwa FPI arus dibubarkan karena melanggar hukum.⁵⁵ FPI dianggap membangun negara di dalam negara

⁵³ Andi Rosadi, *Hitam Putih FPI*, (Jakarta Selatan: Nun Publisher, 2008), 88.

⁵⁴ Syahrul Efendi D dan Yudi Pramuko, *Rahasia Sukses Dakwah Habib-FPI Gempur Playboy*, (Tt: Yudi Pramuko, 2006), 61.

⁵⁵ Andi Rosadi, *Hitam Putih FPI*, 88.

dan mengganggu kedaulatan rakyat. Pemerintah memberikan batas waktu sampai tanggal 1 Januari 2001.⁵⁶ Pernyataan yang menyatakan bahwa FPI melanggar hukum di tolak oleh Habib Rizieq. Ia mengatakan bahwa FPI lahir karena hilangnya aturan hukum dalam masyarakat. Banyaknya aturan pemerintah yang dilanggar, seperti mabuk dan juga berjudi. FPI di lahirkan guna memperbaiki aturan dalam masyarakat, menghilangkan keburukan dalam masyarakat.

FPI di Pasuruan sendiri lahir pada tanggal 26 April 2015, atau tanggal 7 Rajab 1436 H. Pembentukan ini dilakukan pada saat musyawarah wilayah yang bertepatan di Lekok, Pasuruan, Jawa Timur.⁵⁷ Menurut para aktivis FPI di Pasuruan, FPI di bentuk untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf* adalah perintah untuk melakukan segala perbuatan baik sesuai dengan syariat agama Islam. Sedangkan *nahi munkar* adalah menjauhi segala yang buruk yang merupakan larangan dalam ajaran Islam. Dalam mencapai tujuannya, FPI mempergunakan cara yang lembut dalam masyarakat. Oleh sebab itu, FPI dapat memiliki banyak aktivis atau pengikut. FPI dalam melakukan dakwah menggunakan metode memberi *mau'idzah hasanah* atau dengan memberi nasihat yang baik. Dalam berdiskusi, ia juga menggunakan metode terbaik dengan lembut. Dalam membasmi *nahi munkar*, FPI memang sangat tegas. Mereka menggunakan langkah-langkah yang tegas dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan.

FPI dapat berkembang dengan cepat di Pasuruan, hal ini disebabkan oleh medan di Pasuruan yang menguntungkan kelompok FPI. Banyaknya pondok

⁵⁶ Syahrul Efendi D dan Yudi Pramuko, *Rahasia Sukses Dakwah*, 61.

⁵⁷ Nailul Hikam Amalia, *Pandangan Barisan Ansor*, 17.

pesantren di Pasuruan adalah hal yang menguntungkan karena FPI berkedok agama dalam dakwahnya.⁵⁸ Pasuruan yang terkenal dengan masyarakatnya yang sangat agamis merasa sangat membutuhkan pendakwah di era perubahan zaman seperti saat ini. FPI yang sangat gigih dalam dakwah dan sangat pandai dalam merebut hati masyarakat.

FPI saat ini tengah menjadi buah bibir di Indonesia, bahkan mungkin di kancan Internasional. Banyak pihak yang berusaha berpihak dengan FPI, namun tidak sedikit juga yang akan memusuhi FPI.

Pada tanggal 7 Januari 2016, Pasuruan kedatangan tokoh besar FPI yaitu Habib Muhammad Riziq bin Syihab dan juga KH. Hasyim Muzadi yang merupakan ulama Nahdahtul Ulama. Mereka berdua datang untuk menghadiri acara pelantikan DPW dan DPC FPI se-Pasuruan.⁵⁹ Acara tersebut adalah maulid akbar dan diskusi syariah dengan tema “Pemaparan dan Penguatan Aswaja serta Waspada PKI”. Kedua tokoh memaparkan dalam pidatonya untuk menjaga ajaran ahli sunnah wal jamaah atau aswaja. Habib Rizieq mengingatkan bahaya paham radikal, seperti ISIS hingga Komunisme. Kedua tokoh mengingatkan untuk berhati hati terhadap PKI yang dianggap radikal dalam agama dan negara.

Di Pasuruan sendiri, terdapat tokoh yang dianggap memiliki peranan penting dalam FPI. Ia adalah Habib Abdullah bin Yahya al-Haddad.⁶⁰ Ia merupakan sekretaris dewan syura, yang awalnya menjabat sebagai ketua FPI Pasuruan. Ia mengenal FPI pada tahun 2000 sebagai seorang simpatisan yang

⁵⁸ Saeful Anwar, *Front Pembela Islam (FPI) Sebuah Gerakan Dakwah Islam di Indonesia 1998-2009*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011), 22.

⁵⁹ Abdul Qodir Assegaf, *Wawancara*, Pasuruan, 25 Januari 2022.

⁶⁰ Ibid., 23.

berada di bawah naungan Habib Abdurahman Bahlega Assegaf. Habib Abdurahman Bahlega adalah ketua FPI Pasuruan yang tidak berselang lama memberikan mandat jabatannya kepada Habib Abdullah bin Yahya. Habib Abdurahman memberikan mandat tersebut karena ia diangkat menjadi ketua FPI tingkat provinsi.

Pada tahun 2002, Habib Abdullah berhenti dari jabatannya dengan alasan ingin melanjutkan pendidikannya. Setelah itu, pada tahun 2014, ia kembali aktif dan mencoba menghidupkan kembali kegiatan FPI yang terhenti.⁶¹ Habib Abdullah mencoba mengumpulkan para pengurus FPI di Pasuruan, dan ia pun berhasil mengumpulkan anggota FPI hingga di ciptakan SK keanggotaan mereka. Dari anggota tersebut, Habib Abdullah berhasil mengumpulkan anggota lain dan menghidupkan kegiatan FPI seperti berdakwah dan musyawarah. Dari tiap kegiatan yang dilakukan oleh Habib Abdullah, ia berhasil mendapatkan anggota baru dan memperluas FPI di Pasuruan.

B. Format Kepemimpinan dan Struktur Organisasi FPI

1. Struktur FPI

Adapun format kepemimpinan dan struktur dalam organisasi FPI adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Dewan Pemimpin Pusat (DPP) yang terdiri dari imam besar dewan syura dan dewan tanfidzi yang berada di pusat.
- b. Dewan Majelis Luar Negeri (DMLN) yaitu dewan yang mengurus hubungan FPI dalam negeri dengan organisasi atau kelompok di luar negeri.

⁶¹ Saeful Anwar, *Front Pembela Islam (FPI)*, 23.

⁶² Pedoman Front Pembela Islam (Ad/ART) 2013.

- c. Dewan Pemimpin Daerah (DPD) yaitu dewan yang ada di daerah provinsi yang terdiri dari imam daerah, majelis syura daerah dan majelis *tanfidzi*.
- d. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang berada di kota madya atau kabupaten yaitu dewan *tanfidzi* wilayah.
- e. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yaitu pemimpin yang berada di kecamatan, dipimpin oleh dewan *tahfidzi* cabang.
- f. Dewan Pimpinan Ranting (DPR) yaitu ketua yang memimpin di wilayah ranting desa atau kelurahan yaitu dewan *tahfidzi* ranting.
- g. Pengurus Inti:
 - 1) Pengurus inti Majelis Syura dewan kepemimpinan pusat dan daerah adalah seorang ketua, sekretaris, lima orang ketua majelis front yaitu majelis syariat, majelis pembina, majelis penasihat, majelis pengawas dan majelis kehormatan.
 - 2) Pengurus inti Dewan *Tanfidzi* di tingkat pusat yaitu ketua umum, wakil ketua umum, beberapa ketua, sekretaris umum, wakil sekretaris umum dan bendahara umum.
 - 3) Pengurus inti Dewan *Tanfidzi* selain di tingkat pusat terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara.

2. Lima Badan Khusus FPI

Front Pembela Islam memiliki lima badan khusus yang sengaja dibentuk untuk menunjang pergerakan organisasi ini. Lima Bidang Khusus tersebut yaitu:⁶³

⁶³ Pedoman Front Pembela Islam (Ad/ART) 2013.

a. Badan Infestasi Front

Badan Investasi Front (BIF) adalah badan yang bertugas melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang berdampak buruk pada organisasi. BIF terdiri dari dua bagian yaitu Devisi Intelijen dan Devisi Pencari Fakta. Devisi Intelijen adalah badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara rahasia terhadap berbagai hal yang dianggap akan merugikan FPI. selanjutnya Devisi Pencari Fakta yaitu devisi yang bertugas mencari data dan bukti yang akurat untuk mendukung kinerja Devisi Intelejen.

b. Badan anti Teror Front

Badan anti Teror Front (BTF) adalah badan yang bertugas untuk melakukan pencegahan atau mengantisipasi terjadinya teror terhadap FPI. BTF saling bekerja sama dengan BIF untuk melakukan pengawasan dan antisipasi terhadap musuh-musuh Islam FPI.

c. Badan Pengkaderan Front

Badan Pengkaderan Front (BPF) sesuai dengan namanya yaitu pengkadern, maka badan ini bertugas untuk melakukan atau mencari kader baru dalam FPI.

d. Badan Ahli Front

Badan Ahli Front (BAF) adalah badan yang bertugas dalam penelitian atau laboraturiam. Mereka bertugas untuk melakukan kajian terhadap berbagai hal dalam kehidupan yang menyangkut keilmuan.

e. Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai namanya, tugas dari Amil Zakat adalah menyadarkan orang untuk berzakat, mngajak berzakat, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

3. Lima Lembaga Otonom FPI

Adapun lima lembaga otonom yang dimiliki FPI adalah sebagai berikut:⁶⁴

a. Lembaga Pemantau Maksiat Front

Lembaga Pemantau Maksiat Front (PMF) adalah lembaga yang melakukan pemantauan terhadap aktifitas maksiat yang ada di Indonesia. Mereka memantau kegiatan yang dianggap melanggar hukum agama, terlebih mereka fokuskan kepada penguasa negara yang melakukan pelanggaran hukum.

b. Lembaga Dakwah Front

Lembaga Dakwah Front (LDF) adalah lembaga yang menaungi silaturahmi para mubaligh dan para da'i FPI. Selain sebagai wadah silaturahmi, LDF juga memiliki fungsi sebagai pengembang dakwah bagi kalangan aktivis FPI. Sedangkan fungsi eksternalnya adalah melakukan sosialisasi dakwah terhadap masyarakat umum.

c. Lembaga Ekonomi Front

Lembaga Ekonomi Front (LEF) adalah lembaga yang bertugas membangun perekonomian FPI agar tidak melemah dan tetap stabil. LEF memiliki tugas untuk melakukan trobosan bisnis yang dapat dijalankan oleh FPI.

⁶⁴ Pedoman Front Pembela Islam (Ad/ART) 2013.

d. Lembaga Bantuan Front

Lembaga Bantuan Front (LBF) adalah lembaga yang memiliki tugas untuk membantu Fpi dan para anggotanya ketika mereka terjerat hukum.

e. Lembaga Kemanusiaan Front Hilal Merah Indonesia

Lembaga Kemanusiaan Front Hilal Merah Indonesia (HILMI) merupakan lembaga yang bertugas sebagai relawan bencana di Indonesia.

4. Empat Anak Organisasi FPI

Front Pembela Islam memiliki empat anak organisasi otonom yang memiliki AD/ART sendiri, empat anak organisasi tersebut adalah:⁶⁵

a. Laskar Pembela Islam

Laskar Pembela Islam (LPI) adalah barisan pemuda FPI yang memiliki tugas multi fungsi. Struktur kepemimpinan yang ada di LPI di susun berdasarkan prestasi yang dimiliki. Pemimpin LPI yang ada di tingkat pusat disebut imam besar laskar. Di tingkat provinsi, disebut imam laskar.

Sedangkan di kecamatan atau kota disebut qoid laskar. Dan ditingkat desa atau kelurahan disebut amir laskar.

b. Mujahid Pembela Islam

Mujahid Pembela Islam (MPI) adalah organisasi yang difokuskan pada masalah kemasyarakatan dan sosial. MPI sebagai sayap FPI bertugas untuk menyampaikan aspirasi yang ada dalam masyarakat Islam untuk membangun semangat dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*.

c. Serikat Pekerja Front

⁶⁵ Pedoman Front Pembela Islam (Ad/ART) 2013.

Serikat Pekerja Front (SPF) adalah himpunan anggota FPI yang bekerja sebagai buruh atau pegawai. SPF pertama di wujudkan atas desakan para anggota FPI di Tangerang, terlebih para pegawai dan karyawan yang ada di Tangerang.

d. Front Mahasiswa Islam

Front Mahasiswa Islam (FMI) adalah wadah bagi anggota FPI yang masih berstatus mahasiswa. FMI adalah anggota FPI yang ingin menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* serta memiliki intelektual yang mendukung untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*.

5. Struktur Dewan Pimpinan Pusat

Struktur kepemimpinan FPI di pusat memiliki rincian sebagai berikut:⁶⁶

- a. Imam Besar yaitu pemimpin tertinggi FPI
- b. Majelis Syura yang dipimpin oleh seorang ketua dan lima sekretaris serta dibantu lima orang ketua dewan front yaitu dewan syariat, dewan penasihat, dewan kehormatan, dewan pembina dan dewan-dewan pengawas.
- c. Dewan *Tanfidzi* yang terdiri dari ketua umum dan dibantu oleh beberapa orang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.

6. Struktur Dewan *Tanfidzi* di Pasuruan

Adapun struktur kepemimpinan atau dewan tanfidzi di Pasuruan adalah sebagai berikut:⁶⁷

- a. Ketua: K.H. Lukman Aziz
- b. Sekretaris: Ust. Ahmad Qusyairi

⁶⁶ Pedoman Front Pembela Islam (Ad/ART) 2013.

⁶⁷ Pedoman Front Pembela Islam (Ad/ART) 2013.

- c. Bendahara: Ust. Ahmad Syafi'i
- d. Wakil Ketua Bidang Dakwah: Ust. M. Nizar
- e. Wakil Ketua Bidang Hisbah: Ust. H. Maliq Asyiq
- f. Wakil Ketua Bidang Jihad: Ust. H. Mujayyin
- g. Wakil Ketua Bidang Organisasi: Gus Muhammad Nawawi
- h. Sayap Juang: - FMI: Eka Sugeng Ariadi
 - MFI: Ustadzah Hofsoh
 - LPI: Ust. Sunardi

C. Visi Misi Front Pembela Islam Pasuruan

1. Arti penerapan syariat Islam secara *kaffah* adalah penerapan syariat Islam di seluruh kehidupan yaitu akidah, ibadah, *munahakat*, *muamalat*, dan *jinayat*.
Arti penerapan syariat Islam secara *kaffah* adalah kewajiban menjalankan syariat Islam secara individu dalam kehidupan masyarakat dan negara.
2. Arti *khilafah islamiyah* adalah diterapkannya sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan, dan hukum di dunia Islam.

Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Syariat Islam secara *kaffah* di bawah naungan khalifah Islamiyah menurut *manhaj nubuwwah*, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan *hisbah* dan pengalaman jihad.

FPI harus ikut serta dalam menegakkan *khilafah islamiyyah alamiyyah* sesuai syariat Islam, melalui langkah yang logis dan realistis yang elegan dan bertanggung jawab sejalan dengan kemajuan nafas dunia. Antara lain:

- a. Mendorong peningkatan fungsi dan peran organisasi konferensi Islam.
- b. Mendorong pembentukan parlemen bersama dunia Islam.

- c. Mendorong pembentukan pasar bersama dunia Islam.
- d. Mendorong pembentukan fakta pertahanan bersama dunia Islam.
- e. Mendorong penyatuan mata uang dunia Islam.
- f. Mendorong penghapusan paspor dan visa dunia Islam.
- g. Mendorong kemudahan asimilasi perkawinan antar dunia Islam.
- h. Mendorong penyeragaman kurikulum agama dan umum di dunia Islam.
- i. Mendorong pembentukan satelit antar dunia Islam.
- j. Mendorong pembentukan mahkamah Islam Internasional.

D. Paham Keagamaan Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam (FPI) dalam paham keagamaannya sekilas tampak tidak ada perbedaan dengan paham ormas-ormas arus utama (*mainstream*) lainnya di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yakni menganut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Sekali lagi, secara sekilas memang sama antara NU, Muhammadiyah dan FPI juga mengklaim menganut paham Aswaja. Namun jika ditelaah lebih mendalam, menurut Al-Zastrouw Ng dalam bukunya yang berjudul *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI* menjelaskan, bahwa *Ahlussunnah wal Jama'ah* (masyarakat Indonesia menyebutnya Aswaja) walaupun secara tekstual atau secara redaksi sama memilih term Aswaja sebagai dasar paham keagamaannya, tetapi sesungguhnya paham Aswaja ala FPI sangatlah berbeda dengan paham Aswaja ormas Islam arus utama di Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan.⁶⁸

Lebih lanjut Al-Zastrouw Ng menambahkan, jika *Ahlussunnah wal*

⁶⁸ Al-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik*, 96-101.

Jama'ah yang diikuti oleh NU berdasar kepada mazhab al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bidang akidah sebagai representasi Aswaja yang telah dicontohkan Nabi dan para Sahabat. Mengikuti al-Ghazali dan Abu Junaid al-Baghdadi dalam bidang tasawuf. Dalam bidang fikih mengikuti empat mazhab, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik ibn Anas, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahman ibn Hanbal. Adapun dalam bidang hadis mengikuti para ulama beserta kitab-kitabnya yang muktabar seperti Shahih Bukhari (Imam al-Bukhari) dan Shahih Muslim (Imam Muslim). Begitulah paham keagamaan Aswaja yang mayoritas dianut oleh masyarakat Islam Indonesia.⁶⁹

Masih menurut Al-Zastrouw Ng, menurutnya paham Aswaja FPI setelah diteliti justru sama sekali berbeda dengan paham Aswaja ala NU walaupun sama-sama mengklaim mengambil sumber dari Rasulullah dan para Sahabat. Tetapi dalam pembacaan keduanya (NU dan FPI) tidaklah sama. Aswaja yang dipahami FPI lebih dekat dengan Aswaja yang dianut oleh kelompok Salafi-Wahhabi, yakni Aswaja yang tidak kenal kompromi atau Aswaja yang sangat ortodoks (mempertahankan keaslian agama sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para Sahabat pada zamannya). Untuk memperkuat argumentasinya tentang perbedaan Aswaja NU dan FPI, Al-Zastrouw Ng menunjukkan buku yang berjudul *Konsep Dasar Pengertian Ahlussunnah wal Jama'ah* karya Achmad Masduq yang menjadi acuan pokok beragama warga NU. Sedangkan buku tersebut kemudian dikomentari oleh Ahmad Hamdani dan Suyuti Abdullah (aktivis Jamaah Salafi) sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid, 98.

“Kalau yang dimaksud oleh penulis (Achmad Masduq) adalah *Ahlussunnah wal Jama'ah* ala Indonesia (yang sebenarnya mereka Asy'arian), barangkali dibenarkan adanya tarekat-tarekat tersebut. Namun permasalahannya, *Ahlussunnah wal Jama'ah* bukan milik orang Indonesia atau kelompok tertentu saja. Akan tetapi, *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah satu-satunya jalan atau metode yang haq yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya sehingga tidak diperbolehkan seorang pun menentukan cara sendiri ketika menjalankan ibadah atau mendekati diri kepada Allah. Barangsiapa mengamalkan suatu cara dalam agama tanpa mengikuti petunjuk Nabi Saw. maka amalannya tertolak dan dia telah berbuat bidah.”

Dari komentar di atas, membuktikan bahwa Aswaja FPI dengan Aswaja ormas arus utama di Indonesia jelas berbeda. Aswaja FPI sebagaimana telah disinggung sebelumnya paham dan orientasinya sangat dekat dengan Aswaja Salafi, yakni berupaya mempertahankan otentisitas agama, bahkan sampai pada hal-hal yang bersifat simbolis. Perbedaan atas ritus dan simbol dipandang sebagai penyimpangan dalam ajaran agama. Dalam pemahaman kelompok ini, paham keagamaan para Sahabat wajib dipegang kuat dengan alasan Allah dan Rasul-Nya memuliakan para Sahabat, bahkan memujinya. Atas dasar inilah, Aswaja FPI dipahami.

Aswaja FPI beranggapan bahwa memegang teguh ajaran para Sahabat harus dilakukan secara totalitas tanpa *reserve*. Apa yang dipahami, dilakukan dan yang difatwakan oleh para Sahabat yang tercermin dalam diri para pemimpin agama diikuti secara utuh dan apa adanya, tidak ada pengurangan pun tidak ada penambahan. Hal ini meliputi aspek akidah, hukum dan perilaku keseharian seperti cara berpakaian, makan, minum dan salat.⁷¹ Walaupun Aswaja FPI dikatakan sangat dekat dengan Aswaja Salafi dalam aspek tertentu masih menyisakan ruang perbedaan walaupun terbilang tipis. Perbedaan tersebut terletak

⁷¹ Ibid, 99.

pada penerapannya. Kelompok Salafi yang terhimpun dalam *Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jama'ah* (FKAWJ) Yogyakarta yang dipimpin oleh Ja'far Umar Thalib memahami dan mengaplikasikan Aswaja secara kaku dan sangat tertutup. Akibatnya, kelompok FKAWJ ini terlihat sangat ortodoks dan cenderung intoleran terhadap adanya perbedaan. Sikap kaku dan tertutup (eksklusif) tersebut pada gilirannya membawa dampak yang membuat mereka (Salafi) selalu terlibat konflik dengan masyarakat di mana FKAWJ berdakwah.⁷²

Sedangkan FPI dalam menerapkan ajaran Aswaja yang dipahami terasa lebih luwes dan sedikit lebih lunak dari rasa Aswaja Salafi pimpinan Ja'far Umar Thalib tersebut. Meskipun FPI memahami pentingnya *performance* (surah) nabi dalam praktik kehidupan. Pasalnya, mereka masih menerima dan memberi toleransi jika salah satu dari anggotanya ada yang berperilaku tidak sama dengan apa yang dicontohkan nabi dan para Sahabat. *Performance* keislaman mereka terlihat sangat tegas hanya ketika mereka melakukan pengajian umum dan ketika melakukan aksi-aksi *sweeping* (penggerebekan). Inti dari ajaran Aswaja FPI yang penting untuk diketahui adalah mereka tidak membedakan mana ajaran agama yang *ushul* (pokok-pokok agama) dan yang *furu'* (cabang-cabang agama) atau antara ajaran substantif dan simbolik. Menurut mereka membagi-bagi ajaran agama ke dalam dua kategori tersebut dianggap sebagai perbuatan bidah. Bagi mereka, seluruh persoalan agama baik yang *ushul* atau yang *furu'*, yang substantif maupun simbolik, lebih-lebih menghidupkan dan meramaikan sunah-sunah nabi adalah penting meski pada taraf simbolik sekalipun. Tidak mengakuinya mereka

⁷² Ibid, 100.

terhadap perkara *ushul* dan *furu'* dalam agama pada akhirnya membawa mereka pada pemahaman tentang ajaran agama dan sunah-sunahnya ketika dalam tahap penerapan kental sekali dengan nuansa-nuansa ortodoks, yang terkadang jargonnya untuk menerapkan syariat Islam tetapi hakikatnya mengingkari substansi syariat itu sendiri.⁷³

E. Kiprah FPI di Tanah Air

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa sejak FPI dideklarasikan pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm, Tangerang hingga detik-detik sebelum FPI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah pada 30 Desember 2020, sebelumnya FPI telah cukup melebarkan sayapnya dan berkiprah atau turut mengambil peran dalam mewarnai hiruk-pikuk sosial-keagamaan dan sosial-politik Tanah Air selama kurang lebih 23 tahun (1998-2020). Pusat Data Analisa Tempo sekilas merekam tentang sejarah dan kiprah FPI di Tanah Air sebagaimana berikut:⁷⁴

1. FPI dan Aktivitas Sosial-Politik di Indonesia

Walaupun dikatakan bahwa FPI adalah ormas keagamaan, tetapi aktivitas dan praktik politik tidak pernah jauh dari ormas ini. Peralannya, peran sentral *Habaib* (para habib) yang ada dalam tubuh FPI terbukti menjadi nilai tawar tertentu dalam berdialog dan mengambil simpati tokoh-tokoh politik dan tokoh nasional yang cukup berpengaruh di Indonesia. Sejarah mencatat, FPI merupakan salah satu organisasi yang lahir di bawah atmosfer reformasi 1998 dan hadir mengambil peran aktif sebagai ormas dengan memanfaatkan ruang gerak politik demokratisasi Indonesia dari yang semula menganut sistem

⁷³ Ibid, 101.

⁷⁴ [FPI dalam Lintasan Sejarah \(tirto.id\)](http://tirto.id). Diakses pada 03 April 2022.

politik *otoritarianism* di bawah rezim Soeharto menuju era kebebasan (demokrasi).

Ketika Indonesia baru memasuki iklim demokrasi, di mana kebebasan berpendapat dan berdiskusi di ruang-ruang publik menjadi lebih terbuka dibanding dengan era sebelumnya, di sinilah para habib yang ada dalam tubuh FPI mulai memanfaatkan momen kebebasan tersebut dengan cara banyak melakukan safari dakwah dan silaturahmi ke berbagai tokoh-tokoh berpengaruh di negeri ini. Terkait hal tersebut, Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal dalam *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia ke Nigeria* mencatat bahwa, FPI cukup dekat dengan orang-orang yang berada dalam *circle* (lingkaran) Soeharto, khususnya dengan Prabowo Subianto (menantu Soeharto sekaligus Perwira Tinggi Militer pada tahun 1998). Namun setelah nama Prabowo sempat meredup dan diberhentikan dari TNI karena kasus penculikan aktivis 1998, kemudian FPI mengalihkan kedekatannya kepada Jenderal Wiranto.

Kedekatan FPI dan Wiranto cukup terlihat jelas ketika terjadi aksi ratusan milisi FPI mendatangi kantor Komnas HAM dalam rangka mengajukan protes atas pemeriksaan terhadap Jenderal Wiranto yang diduga memiliki kasus yang kurang lebih mirip dengan apa yang dialami Prabowo, yakni terlibat sengkaret kasus 1998. Selain kedekatannya dengan sang Jenderal, FPI juga terjun mendekati anak buah (ABRI/TNI). Kedekatannya dengan ABRI/TNI terlihat dalam aksi kontra-narasi yang dilakukan FPI terhadap mahasiswa yang hendak memprotes dan menentang RUU Keadaan Darurat/RUU PKB yang diajukan

Mabes TNI kepada DPR pada 24 Oktober 1999.

Adapun tokoh lain yang diduga dekat dengan FPI, bahkan turut mendukung FPI dalam berbagai aktivitasnya adalah Mayjen (Pol) Nugroho Djayoesman dan Pangdam Jaya (yang selanjutnya diangkat menjadi Pangkostrad Mayjen TNI Djaja Suparman. Pusat Data Analisa Tempo mengutip hasil riset ISAI mencatat, bahwa FPI sempat mendatangi Polda Metro Jaya dan berdiskusi di dalamnya. Diskusi FPI dan Polda Metro Jaya menghasilkan sebuah instruksi dari FPI yang meminta agar seluruh aparat tidak ragu-ragu dalam memberantas narkoba. Di luar hal itu, FPI juga tidak jarang mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan dengan para petinggi militer sebagaimana yang pernah dilakukan dengan Mayjen Djaja Suparman di Hotel Milenium Jakarta, mendekati hari pelaksanaan Sidang Umum MPR 1999. Begitu pun sebaliknya, tidak hanya orang-orang FPI saja yang mendatangi tokoh-tokoh tersebut, tetapi beberapa petinggi militer dan kepolisian, khususnya di tingkat DKI Jakarta juga kerap menghadiri apel siaga yang digelar FPI maupun ormas-ormas lainnya yang menyandang nama/gelar “PAM Swakarsa”.⁷⁵

FPI secara garis besar orientasi organisasinya memang bukan organisasi politik, akan tetapi, meskipun demikian FPI juga turut ikut campur dalam dunia politik secara tidak langsung dengan cara mendukung dan membuat propaganda citra politik positif terhadap kubu-kubu tertentu yang disukai FPI.

⁷⁵ PAM Swakarsa merupakan Pasukan Keamanan Masyarakat (PAM) yang identik dengan sekumpulan masyarakat sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa 1998 dan aksi untuk mendukung Sidang Istimewa (SI) MPR pada tahun 1998.

Beberapa momen tampak merekam perjalanan FPI dalam dunia politik, seperti pada saat FPI masuk ke dalam unsur-unsur milisi sipil yang dimobilisasi untuk mendukung presiden BJ. Habibie menjelang Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Dalam peristiwa tersebut, FPI turut membaaur dengan ormas-ormas Islam seperti KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan yang lainnya untuk mendukung presiden BJ. Habibie yang dinilai memiliki kesamaan ideologis dengan mereka.

Momen selanjutnya, terekam dalam pemilu pada tahun 2004, demi menunjukkan totalitas dukungannya terhadap pasangan Capres dan Cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid, FPI suka-rela membuat propaganda politik dan mengirim anggota-anggotanya ke berbagai daerah guna untuk mendiskreditkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pesaing berat Wiranto kala itu. Namun sayang Wiranto kalah dalam persaingannya melawan SBY. Akan tetapi, walaupun Wiranto tidak sukses memenangkan pemilu 2004 dan gagal menjadi presiden, FPI tetap berkembang dan mengepakkan sayapnya serta terus bertransformasi dalam mendukung kubu-kubu tertentu, bahkan hingga momen dukungan terakhir FPI sebelum bubar, terekam dalam pemilu 2019 yang lalu, di mana FPI sangat getol mendukung pasangan calon Prabowo-Sandi dan mendiskreditkan pasangan calon Jokowi-Amin. Walau pada akhirnya, lagi-lagi tokoh yang FPI dukung selalu kalah dalam persaingan.

2. Gerakan/Aksi Sosial Keagamaan FPI di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, FPI dalam menjalankan gerakan

sosial-keagamaannya atau aksi-aksinya, semua itu tidak lepas dari pembacaan atau pemahaman mereka atas agamanya. Sebelumnya telah disebutkan, bahwa FPI dengan paham Aswajanya bisa dikatakan bersaudara dengan Aswaja yang dipahami kelompok Salafi, hanya saja jika Salafi memahami Aswaja dengan sangat tertutup. Sedangkan FPI memahaminya dengan sedikit lebih luwes, tetapi tetap saja nuansa-nuansa keagamaan ortodoks antara Salafi dan FPI nyaris tidak bisa dibedakan.

Oleh karenanya, pemahaman FPI terhadap syariah Islam secara *kaffah* dalam pengertian mereka adalah tidak mencampur adukkan agama dengan unsur-unsur lain yang dapat membawa pada perbuatan bidah. Syariat Islam yang dipahami secara simbolik dan kaku merupakan jalan metode FPI dalam menerapkan Islam *kaffah* dalam perilaku kesehariannya. Pemahaman atau cara pandang yang demikian pada akhirnya membawa FPI beserta segenap anggotanya pada *image* atau citra yang negatif. Gerakan-gerakan FPI di masyarakat tidak jarang menuai pro dan kontra, fakta yang terjadi di masyarakat justru menunjukkan kebanyakan kontra. Berikut merupakan beberapa gerakan sosial-keagamaan radikal FPI yang berhasil dihimpun oleh Tempo.co:⁷⁶

- a. 22 November 1998: Insiden kerusuhan di Ketapang yang melibatkan konflik/perkelahian antara FPI dan kelompok preman yang diduga berasal dari Ambon. Aksi ini dipicu oleh adanya berita perihal perusakan masjid di daerah Ketapang. Kemudian berita tersebut sampai kepada FPI dan akhirnya

⁷⁶ Lihat selengkapnya dalam [Aneka Kekerasan ala FPI - Nasional Tempo.co](#) dan [Jejak Kekerasan FPI & Tarik-Ulur Izin dari Pemerintah \(tirta.id\)](#). Lihat pula dalam [Daftar aksi Front Pembela Islam - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#). Diakses pada 04 April 2022.

FPI terjun lapangan sehingga konflik antara FPI dan perusak masjid tersebut tidak bisa dielakkan. Aksi ini pula yang menjadi penanda api radikal FPI yang pertama kali.

- b. 1 November 2004: Sekitar 500 anggota FPI merusak sejumlah kafe dan bentrok dengan Forum Masyarakat Kemang.
- c. 27 Juni 2005: FPI menyerang kontes Miss Waria di Sarinah, Jakarta Pusat.
- d. 12 April 2006: FPI menyerang kantor majalah *Playboy*.
- e. 1 Juni 2008: FPI bentrok dengan aktivis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Sebanyak 27 aktivis terluka dianiaya FPI.
- f. 31 April 2010: FPI membubarkan acara kaum waria di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat.
- g. 24 Juni 2010: FPI Banyuwangi membubarkan sosialisasi kesehatan dari Komisi Kesehatan DPR karena diduga berbau Komunis.
- h. 4 Mei 2012: FPI membubarkan diskusi buku *Allah, Liberty, & Love* karya Irshad Manji di Salihara, Jakarta Selatan.
- i. 28 Juni 2013: Juru bicara FPI, Munarman, menyiramkan air teh ke pengamat Tamrin Amal Tomagola dalam acara *Kabar Pagi* di *TV One*.
- j. 3 Oktober 2014: FPI melakukan demonstrasi di depan Balai Kota dan DPRD Jakarta. Aksi tersebut dilakukan oleh FPI sebagai ekspresi ketidaksukaan terhadap Wakil Gubernur DKI (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok) pada saat itu. Kotoran hewan dan batu menjadi senjata utama FPI dalam demonstrasi tersebut.

k. 23 Desember 2015: Anggota FPI Surabaya keliling dan geruduk beberapa mal-mal besar di Surabaya saat menjelang tahun baru 2016. Mereka menghimbau agar pegawai mal yang beragama Islam untuk tidak dipaksa menggunakan atribut-atribut natal.⁷⁷

Aksi-aksi tersebut di atas merupakan aksi yang dinilai radikal atau anarkis dan masih banyak aksi-aksi lainnya yang dilakukan oleh FPI, baik itu aksi damai maupun aksi-aksi safari dakwah mereka di berbagai kota di Indonesia. Hingga pada akhirnya tanggal 20 Desember 2020 FPI secara resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁷ [FPI Geruduk Mal, Ini Tuntutan Mereka Soal Atribut Natal - Nasional Tempo.co](http://nasionaltempo.co). Diakses pada 4 April 2022.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP UPAYA RESILIENSI DALAM GERAKAN NKRI BERSYARIAH MENURUT PERSPEKTIF TEORI KONFLIK RALF DAHRENDORF

A. FPI dan NKRI Bersyariah

Wacana NKRI Bersyariah yang digelindingkan FPI tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan ia lahir membawa berbagai alasan atau argumentasi serta melalui proses diskusi yang cukup panjang. Namun sayang, wacana tersebut dari sejak pertama kali dipahami dan dikampanyekan oleh FPI hingga hari ini tidak pernah berhasil mewujudkan di Indonesia. Wacana yang sama, bahkan lebih tua dari wacana NKRI Bersyariah yang digagas FPI muncul sejak Indonesia baru pertama kali mempersiapkan kemerdekaannya, tepatnya dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).⁷⁸

Jadi, apabila di kemudian hari masih banyak bermunculan wacana tentang negara yang berlandaskan hukum Islam *kaffah* atau NKRI Bersyariah sebagaimana FPI mewacanakan. Semua itu tidak lebih dari sekedar romantisme sejarah belaka, dan sejarah yang dimaksud negara Islam itu tidak pernah ada di Indonesia sebelumnya. Kendati demikian, wacana atau gerakan yang berusaha untuk mengesampingkan Pancasila dengan konsep lain sekalipun berbasis agama, adalah tugas seluruh masyarakat Indonesia untuk membendung wacana dan

⁷⁸ Lihat Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dan Syaiful Bahri, "NKRI Bersyariah: Praktik Spasial, Representasi Ruang, Ruang Representasional", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No. 2 (Oktober 2020), 223-249.

gerakan yang demikian itu, termasuk salah satunya adalah NKRI Bersyariah FPI. Wacana NKRI Bersyariah sebenarnya bukan suatu konsep yang sistematis, alih-alih menjadi solusi alternatif untuk merombak Pancasila, NKRI Bersyariah justru tak lebih dari sekedar wacana itu sendiri.

NKRI Bersyariah pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Rizieq Shihab (Imam besar FPI) di dalam karyanya yang berjudul “*Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah*”. Selain diperkenalkan melalui karyanya, wacana tersebut juga diorasikan atau dideklarasikan pada acara Milad ke-14 tahun 2012 silam, pada acara tersebut Muhammad Rizieq Shihab berpidato sebagaimana berikut:⁷⁹

“Saya Habib Rizieq Syihab menyatakan NKRI hari ini akan menerapkan syariah secara kaffah, hal-hal mengenai penyesuaian dan amandemen konstitusi serta berbagai perundangan yang ada kepada Konstitusi dan perundangan syariah akan dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, Jakarta 2014, Presiden NKRI Bersyariah, Habib Rizieq Syihab.”

kemudian wacana NKRI Bersyariah mulai akrab dikenal khalayak umum.⁸⁰ Pada perkembangan selanjutnya, wacana NKRI Bersyariah mulai ramai kembali di ruang publik sejak digelarnya aksi demonstrasi FPI yang dikenal dengan aksi bela Islam III pada 2 Desember 2016, aksi ini kemudian dinamai sebagai aksi 212. Tidak cukup sampai di situ, FPI memperkuat massanya dengan menggelar reuni 212 pada 2 Desember 2017.

Walaupun NKRI Bersyariah bukan sebuah konsep yang sistematis dan struktur layaknya ideologi, akan tetapi setidaknya M. Rizieq Shihab selaku orang nomor satu dalam organisasi yang gemar memakai atribut jubah putih itu telah

⁷⁹<https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/02/25/23403/membedah-apa-itu-nkri-bersyariah-saatnya-memiliki-presiden-syariah/>. Diakses pada 12 April 2022.

⁸⁰ Rabbani Lubis, “NKRI Bersyariah”, 238.

membeberkan beberapa konsep NKRI Bersyariah. Dalam analisa pinterpolitik.com mengulasnya sebagai berikut.⁸¹

1. Beragama, bukan ateis atau komunis yang tanpa agama
2. Menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing
3. Melindungi umat Islam sebagai mayoritas rakyat dari mengonsumsi segala produk yang halal baik makanan dan minuman serta pakaian maupun kosmetik dan alat kebersihan serta obat-obatan
4. Menghormati dan mencintai para ulama beserta santri bukan mengkriminalisasi atau menterorisasi mereka
5. Menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri
6. Menjaga bangsa dan negara dari ekonomi riba yang telah diharamkan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya
7. Anti korupsi, anti miras, anti narkoba, anti judi, anti pornografi, anti pornoaksi, anti prostitusi, anti LGBT, anti teroris, anti separatis, anti fitnah, anti kebohongan, anti kemungkar, anti kezaliman
8. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 asli yang dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagaimana amanat dekrit presiden 5 Juli 1959

Menurut VOA Islam sebagaimana mengutip pernyataan Muhammad Al-Khaththath (Sekjen FUI) menegaskan tentang kata kunci dan urgensi NKRI

⁸¹ <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/mewujudkan-nkri-bersyariah/>. Diakses pada 12 April 2022. Lihat juga <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/04/haikal-hassan-beberkan-7-konsep-nkri-bersyariah-yang-pernah-digaungkan-habib-rizieq>. Diakses pada 12 April 2022.

Bersyariah sebagaimana berikut:⁸²

“NKRI yang menjalankan seluruh fungsi-fungsi pemerintahan NKRI dengan syariah Allah. Presiden atau kepala negara dan seluruh pembantunya mengelola NKRI dengan syariah. Sehingga NKRI mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah Swt secara praktis dengan mensyariahkan seluruh perangkat negara dan undang-undang serta segala peraturannya. Maka UU Allah Swt, yakni *nash-nash* Alquran dan Sunah, menjadi UU tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi segala perundangan yang ada di NKRI. Sehingga dasar negara Ketuhanan YME praktis terwujud, tidak diselewengkan dengan bercokolnya UU Anti Tuhan (Sosialis Komunis) dan Anti Kekuasaan Tuhan (Sekularis Liberalis).”

B. FPI *Vis a Vis* Pemerintah

Sudah jamak diketahui bahwa FPI sering kontra terhadap kebijakan politik pemerintah yang dinilai berseberangan dengannya, utamanya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang dinilai mencederai nilai-nilai agama seperti ketidakadilan, banyaknya tempat-tempat maksiat yang cenderung diabaikan begitu saja oleh pemerintah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan isu keagamaan dan kemanusiaan, FPI sering kali menjadi garda utama dalam menghadapi isu-isu tersebut. Begitu juga sebaliknya, pemerintah tidak jarang menuding FPI sebagai ormas keagamaan yang cenderung radikal. Tudingan tersebut tentu saja bukan tanpa alasan, melainkan memang aksi-aksi FPI di masyarakat sudah menjadi rahasia umum bahwa gerakan sosial keagamaannya memang begitu adanya. Sehubungan dengan hal itu, menurut Sudirman (anggota FPI Pasuruan, Jawa Timur) menuturkan:

“Sebenarnya FPI tidak pernah punya musuh siapa pun itu, apalagi pemerintah, FPI sepenuhnya tunduk dan patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang ada di Tanah Air tercinta ini, bahkan FPI selalu mendukung dan siap menjadi partner pemerintah apabila ada kerjasama atau gotong-royong untuk kebaikan umat Islam dan segenap

⁸² <https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/02/25/23403/membedah-apa-itu-nkri-bersyariah-saatnya-memiliki-presiden-syariah/>. Diakses pada 12 April 2022.

bangsa Indonesia secara keseluruhan tanpa terkecuali. Tetapi yang namanya mendukung kan tidak harus semuanya didukung. Kami cinta negeri ini, sebagaimana layaknya orang yang cinta terhadap sang kekasih, tentu saja apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kekasih kita keliru misalnya, apakah yang demikian itu harus selalu didukung? Jika pemerintah sejalan dengan keadilan dan tidak melenceng dalam membuat kebijakan tentu saja semua itu akan kami dukung dan kami siap menjadi pendukung yang paling depan. Intinya adalah FPI tidak pernah sedikit pun kontra terhadap negara, tetapi FPI bisa saja kontra dengan pemerintah apabila pemerintahannya tidak berjalan di atas keadilan, maka itulah sesungguhnya yang kami kritisi.”⁸³

Nada yang sama juga disampaikan oleh Kurnadi selaku koordinator bidang dakwah FPI Pasuruan:

“FPI tidak pernah anti negara, tidak anti terhadap pemerintah apalagi anti terhadap Pancasila. Bahwa ketika ada pandangan yang menilai ormas FPI sebagai ormas radikal atau keras dan lain sebagainya, itu memang demikian adanya. Tetapi jangan hanya berhenti di situ saja, coba lihat dan telaah duduk bareng bersama kami (FPI). FPI itu radikal dan tidak akan segan-segan untuk bertindak tanpa takut terhadap siapa pun ketika FPI melihat adanya kemungkaran yang marak terjadi di negeri ini. walaupun demikian, ketika kami (FPI) melakukan aksi *sweeping* terhadap tempat-tempat maksiat, sebelumnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang, yakni aparat pemerintah untuk diskusi perihal kemaksiatan yang hendak kami tinjau, dan apabila aparat sudah tidak mengindahkan, maka kami selaku ormas Islam yang tegas terhadap segala macam bentuk kemungkaran, maka kami akan bertindak langsung ke lapangan.”⁸⁴

Tidak jauh berbeda dengan kedua pernyataan di atas, Arifin pemuda milenial FPI yang juga berdomisili di Pasuruan menegaskan:

“Selama ini *image* FPI dinilai terlalu berlebihan, baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat yang secara paham keagamaan sedikit banyak mungkin berbeda dengan pemahaman kami (FPI), perbedaan pemahaman yang di maksud adalah metode perjuangan atau metode dakwah FPI dengan ormas-ormas Islam lainnya yang ada di Indonesia. Sementara syahadat kita semua masih sama, Alquran dan hadis kita masih sama tidak ada yang berbeda di situ, lantas apa yang menyebabkan kami (FPI) selalu

⁸³ Sudirman, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Maret 2022.

⁸⁴ Kurnadi, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Maret 2022.

dipandang sebagai ormas yang radikal, ormas yang keras, ormas yang semua seakan-akan tidak absen dari citra negatif. Padahal kita semua tentu menyadari bahwa setiap individu itu pasti memiliki perbedaan apalagi dalam ranah perjuangan keagamaan, soal perbedaan metode dakwah dan metode perjuangan harusnya tidak perlu dipermasalahkan selama tidak menodai aqidah Islam. Sekali lagi FPI memang radikal ketika melihat kemungkaran, dalam artian radikal untuk segera membasmi dan menegakkan amar makruf nahi mungkar sebagaimana termaktub dalam visi dan misi FPI.”⁸⁵

C. Dari Front Pembela Islam ke Front Persatuan Islam (FPI): Wadah Baru Perjuangan NKRI Bersyariah

Mengutip hasil laporan pemberitaan nasional tempo.co, pasca pembubaran FPI oleh pemerintah, tidak menunggu lama langsung disusul dengan deklarasi Front Persatuan Islam yang disingkat tetap menjadi FPI pada 30 Desember 2020. Tampak beberapa tokoh yang mendeklarasikan Front Persatuan Islam antara lain: Abu Fahir Alattas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alattas, I Tuankota Basalamah, Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M. Luthfi.⁸⁶ Dalam deklarasinya tersebut, Front Persatuan Islam merilis keterangan resmi sebagaimana berikut:

“Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.”

Namun demikian, ada hal yang cukup menarik dari Front Persatuan Islam yang baru saja dideklarasikan pasca Front Pembela Islam dibubarkan, pasalnya FPI yang baru ini tidak akan didaftarkan ke Kemendagri sebagaimana

⁸⁵ Arifin, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Maret 2022.

⁸⁶ [FPI Dibubarkan, Berganti Nama Jadi Front Persatuan Islam - Video Tempo.co](http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/). Diakses pada 13 April 2022.

FPI lama yang sebelumnya terdaftar di Kemendagri.

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak didaftarkannya FPI baru ke Kemendagri dengan alasan bahwa, kebebasan berserikat dan berkumpul telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28e ayat (3) juncto putusan MK Nomor 82 Tahun 2013. Dengan demikian, maka Artinya, organisasi yang tak memiliki SKT bukan lantas dinyatakan atau dianggap bubar, melainkan hanya tidak terdaftar.⁸⁷ Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Front Persatuan Islam oleh segenap pemimpin dan anggota serta simpatisan eks FPI adalah untuk melanjutkan perjuangan, yakni perjuangan untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar dan untuk mewujudkan NKRI Bersyariah sebagai jalan alternatif untuk merawat Tanah Air tercinta dan membebaskannya dari belenggu kezaliman dan ketidakadilan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ilham Suroso (anggota aktif eks FPI Pasuruan yang hari ini juga mulai aktif di Front Persatuan Islam yang baru), ia menegaskan bahwa:⁸⁸

“Dibubarkannya FPI oleh pemerintah tidak lantas membuat nyali perjuangan kami turut bubar seiring dengan pembubaran tersebut, tetapi kini FPI baru dengan semangat juang yang sama hadir di Indonesia walaupun tanpa harus ribet-ribet daftar di Kemendagri. Semangat perjuangan kami tidak akan pernah luntur selama kezaliman dan ketidakadilan serta merajalelanya kemungkaran dan kemaksiatan masih membumi di Indonesia. Cita-cita mewujudkan Indonesia Bersyariah tetap menjadi nafas perjuangan FPI (Front Persatuan Islam) yang baru.”

Seiring dengan lahirnya Front Persatuan Islam (FPI) sebagai FPI *reborn*, lantas bagaimana metode dakwah dan perjuangan mereka, lalu bagaimana mereka bisa tetap bertahan dalam mewujudkan Indonesia yang bersyariah atau

⁸⁷ [Front Persatuan Islam Tak akan Didaftarkan ke Kemendagri - Nasional Tempo.co](http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/). Diakses pada 13 April 2022.

⁸⁸ Ilham Suroso, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Maret 2022.

NKRI Bersyariah? Jawaban dari sekilas pertanyaan tersebut akan penulis sajikan dalam beberapa pernyataan hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota eks FPI sebagaimana berikut ini:

“NKRI Bersyariah sebagai cita-cita FPI, baik FPI yang sudah dibubarkan maupun FPI yang sekarang sejatinya tidak ada yang berubah dari yang dulu. Intinya masih tetap sama, yakni ingin mengentaskan Indonesia dari kubangan kezaliman, kemaksiatan dan dari jurang dalam ketidakadilan.” (Agus Efendi: Aktivistis Muda Front Persatuan Islam)⁸⁹

“Yang dibubarkan oleh pemerintah itu izin dari nama organisasi Front Pembela Islam, perihal semangat juang, dakwah dan jihad di jalan Allah dalam menegakkan keadilan tidak pernah bubar dalam jiwa dan raga kami (FPI). Pemerintah membubarkan izin FPI amat sangat mudah, tetapi tidak semudah itu dalam membubarkan semangat perjuangan orang-orangnya, bahkan selama kezaliman dan ketidakadilan masih merata di Indonesia, maka perjuangan FPI tidak akan pernah usai.” (Imam Arifin: Aktivistis FPI Pasuruan)⁹⁰

“Front Persatuan Islam sebagai wadah baru perjuangan FPI dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar dan NKRI Bersyariah akan tetap berlanjut dengan penuh semangat juang yang tidak pernah putus, itu merupakan komitmen kami bersama demi mencintai dan merawat Tanah Air tercinta ini.” (Rijal Afif: Anggota Front Persatuan Islam)⁹¹

“Mewujudkan NKRI Bersyariah di Indonesia seakan menjadi momok yang mengerikan. Padahal NKRI Bersyariah bukan antitesis terhadap Pancasila, alih-alih mengganti Pancasila dengan sistem yang lain, justru NKRI Bersyariah ini dimaksudkan untuk memberantas ketidakadilan hukum dan mempertegas hukum yang seringkali melemah di Indonesia, walau bukan salah hukumnya tetapi lebih kepada oknum-oknumnya. NKRI Bersyariah ditujukan untuk membumbui peraturan dan perundangan-undangan agar tidak melenceng jauh dari konstitusi dan norma-norma kemanusiaan secara universal. Adapun Islam menjadi ruh di dalamnya itu bukanlah masalah yang harus dipermasalahkan, walau demikian, Islam tidak pernah menceraikan kebebasan, bahkan malah mendukungnya selama diikuti dengan tanggung jawab moral dan agama. Islam tidak pernah menyuruh pemeluknya untuk menomorduakan minoritas. Bahkan Islam itu sangat universal dan terbuka selama tidak menodai akidah yang nyata-nyata

⁸⁹ Agus Efendi, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Maret 2022.

⁹⁰ Imam Arifin, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Maret 2022.

⁹¹ Rijal Afif, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Maret 2022.

sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dari sini lantas apa yang ditakutkan ketika Islam menjadi ruh dari semangat NKRI Bersyariah?" (Armaedi: Aktivis FPI)⁹²

“Tidak perubahan dalam arah perjuangan dan metode perjuangan FPI dari FPI yang katanya sudah bubar sampai dengan lahir FPI yang baru. Semua itu tetap dengan satu prinsip yang sama, yakni menegakkan amar makruf nahi munkar. Kami (FPI) akan terus berdakwah sebagaimana biasa dilakukan oleh FPI yang dulu dari segi metode atau cara semuanya tidak ada yang berubah, tetap akan mengajak seluruh elemen bangsa untuk senantiasa beramal saleh, menjalankan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar. Sebisa mungkin kami akan terus memperjuangkan NKRI Bersyariah dengan cara berdakwah dimulai dari masyarakat akar rumput. Jika di atas (pemerintah) masih belum bisa berbuat adil dan bijaksana serta masih belum bisa memberantas seluruh kemaksiatan dan kemungkaran, setidaknya semua itu bisa dimulai dari unit terkecil (individu-individu dari rakyat) dulu baru kemudian beranjak ke unit selanjutnya.” (Sufyan: Pegiat dakwah Islam FPI Pasuruan)⁹³

Sebagaimana beberapa uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perjuangan NKRI Bersyariah tetap sebagaimana adanya dahulu yang pernah diperjuangkan oleh FPI, dan FPI yang baru hari ini atau Front Persatuan Islam sekarang tak ubahnya ibarat seseorang yang hanya sekedar ganti baju atau ganti kostum saja. Selebihnya adalah sama tidak ada perbedaan kecuali namanya saja dari yang semula FPI (Front Pembela Islam) kini menjadi FPI (Front Persatuan Islam).

D. Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf Terhadap Upaya Resiliensi Gerakan NKRI Bersyariah FPI

Sebagaimana yang telah disinggung di muka, bahwa Teori Konflik merupakan suatu perspektif yang melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang tersusun atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan

⁹² Armaedi, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Maret 2022.

⁹³ Sufyan, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Maret 2022.

lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.⁹⁴ Menurut Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin sebagaimana mengutip Ritzer dan Goodman (2005) menjelaskan, Asumsi dasar teori konflik Ralf Dahrendort adalah bahwa, seluruh masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan dan pertikaian. Sementara apa yang disebut sebagai konflik selalu ada dalam sistem sosial. berbagai elemen kemasyarakatan turut memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan yang terjadi dalam masyarakat tercipta dan lahir dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Berhubungan dengan hal ini, FPI beserta segenap agenda dan gerakannya telah menjelma menjadi sistem sosial di dalam masyarakat tertentu. Di samping agenda dan gerakan FPI sering ditampilkan di masyarakat, hal itu juga bertujuan untuk menanamkan sistem atau tatanan di masyarakat. Sedangkan kepentingan yang ada di dalamnya seakan menjadi instrumen yang tidak bisa dihindari. Berbagai kepentingan yang dimaksud adalah wajar belaka, sebab manusia baik individu maupun kelompok mesti harus hidup dengan adanya proses tukar tambah kepentingan. Terlepas apakah kepentingannya itu bersifat positif ataupun sebaliknya, negatif. Tetapi yang pasti kepentingan itu selalu ada. Pertikaian dan konflik sering terjadi akibat adanya berbagai macam kepentingan yang berbeda-beda. Bisa saja kepentingan yang didorong dari atas (penguasa) kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai orang yang berada di bawah kekuatan penguasa, maka

⁹⁴ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi Sosiologi Masyarakat Aceh* (Nangroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2015), 39.

dengan demikian pertikaian, konflik dan kepentingan dimenangkan oleh struktur tertinggi (penguasa).

Dalam hal ini, FPI bagaimanapun dikatakan ia gigih dalam berjuang dan berdakwah demi kebaikan agama, bangsa dan negara tetap saja FPI sebagai bagian dari elemen sosial akan selalu tunduk pada proses perubahan yang lahir dari tekanan otoritas kekuasaan. Tentang dua wajah masyarakat yang diungkapkan oleh Ralf Dahrendorf adalah konflik dan konsensus. Wajah *pertama*, yakni konflik yang menggambarkan tentang berbagai macam adanya kepentingan dalam sistem sosial masyarakat. Sedangkan wajah kedua, yakni konsensus menggambarkan adanya nilai-nilai integritas dalam sistem sosial masyarakat. Oleh karenanya, menurut Dahrendorf teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian yakni teori konflik dan teori konsensus. Yang pertama adalah untuk menguji kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat dan yang kedua adalah untuk menguji nilai-nilai integritas dalam suatu sistem sosial di masyarakat.⁹⁵ Selain itu, Dahrendorf juga menambahkan, bahwa masyarakat tidak akan ada tanpa adanya konsensus dan konflik.

Poin selanjutnya yang juga penting untuk digaris bawahi dalam teori konflik Dahrendorf ini adalah mengenai penjelasannya tentang adanya dua kelompok dalam masyarakat, baik masyarakat dalam konteks mikro maupun dalam konteks makro (negara). Dua kelompok yang dimaksud adalah kelompok superordinat (atasan/penguasa) dan kelompok subordinat (bawahan/masyarakat biasa). Mereka yang berada pada posisi superordinat akan selalu berambisi untuk

⁹⁵ Ibid, 41.

mempertahankan kemapanan (*status quo*). Sebaliknya, bagi mereka yang berada dalam posisi subordinat selalu berambisi ingin melakukan perubahan terhadap superordinat. Jika teori tersebut ditarik ke dalam konteks upaya resiliensi FPI dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar dan NKRI Bersyariah, maka FPI masuk ke dalam kategori subordinat (bawahan) yang berada di bawah kontrol kekuasaan. Sedangkan pemerintah jelas posisinya sebagai superordinat yang menguasai segenap lapisan masyarakat (rakyat) tidak terkecuali FPI.

Wacana NKRI Bersyariah beserta konsep amar makruf nahi mungkar yang digagas FPI, hal itu semua tidak lain adalah proses subordinat yang ingin melakukan perubahan tatanan sistem sosial kepada superordinat, seperti NKRI Bersyariah ditujukan oleh FPI kepada pemerintah yang dinilai zalim dan tidak adil. Oleh karenanya, NKRI Bersyariah dimaksudkan sebagai alternatif agar mencapai keadilan dan memberantas ketidakadilan. Sementara pihak pemerintah sebagai superordinat berupaya untuk terus mempertahankan *status quo*, yakni Pancasila dan UUD 1945 sebagai kunci NKRI yang tidak boleh direcoki oleh konsep atau wacana apa pun yang berpotensi menambah atau mengurangi substansi dari keduanya. Dan benar bahwa apa yang diungkapkan Dahrendorf, bahwa posisi subordinat selalu dipaksa tunduk kepada kebijakan-kebijakan otoritatif yang dibuat dan dipaksakan oleh superordinat. Itulah sebabnya, kendati FPI sudah memiliki jutan masa yang sangat militan, lagi-lagi ia tetap tunduk pada keputusan pemerintah dan seperti yang diketahui bersama, kini secara resmi FPI sudah berhasil dibubarkan oleh pemerintah.

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dari bab I sampai dengan bab IV, maka berdasarkan hasil analisis pada bab terakhir ini dapat diketahui bahwa:

Pertama: konsep atau wacana NKRI Bersyariah pasca pembubaran FPI oleh pemerintah ternyata tidak membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap FPI. FPI dan para anggota serta pengikutnya tetap eksis dengan cita-cita NKRI Bersyariah sebagaimana ketika FPI masih berada pada status ormas terdaftar. Perihal ideologi, wacana atau pemikiran, bahkan semangat perjuangan dakwahnya tetap dianut dan dijalankan oleh para pengikutnya.

Kedua: Upaya resiliensi atau langkah FPI dalam mengembangkan semangat NKRI Bersyariah ditempuh dengan jalan mendirikan ormas baru yang bernama FPI (Front Persatuan Islam) bukan lagi sebagai (Front Pembela Islam). Adapun semangat cita-citanya, metode dakwahnya, penerapan amar makruf nahi mungkarnya tetap tidak keluar dari ruh NKRI Bersyariah. Namun, sebagaimana tinjauan teori konflik Ralf Dahrendorf, FPI sebagai subordinat tetap kalah dan tunduk kepada keputusan superordinat (pemerintah)

F. Saran

Sebagai saran untuk para peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan pengembangan riset dengan objek material yang sama., penulis menyarankan agar meneliti tentang bagaimana potensi Front Persatuan Islam (FPI) yang baru dalam

menciptakan populisme Islam hari ini. mengingat FPI yang dikenal sebagai ormas militan tentu akan tetap menarik jika diteliti lebih lanjut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan, Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Hikam Amalia, Nailul. *Pandangan Barisan Ansor Serbaguna Gresik Mengenai Konsep NKRI Bersyariah Front Pembela Islam*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2013.
- Muslim, "Gerakan Sosial Keagamaan FPI (Front Pembela Islam)", *AJIQS*, Vol. 1, No. 2. (Desember 2019).
- Mahendra Wahanaputra Ladjar, Bonfilio. [Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan Halaman all - Kompas.com](#). Diakses pada 7 Maret 2022.
- Nur Tualeka, M. Wahid. "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern" *Jurnal al Hikmah*, Vol. 3, No. 1. (Januari, 2017).
- Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Samuel, "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian", <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>, Diakses pada 05 November 2021.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Efendi D, Syahrul dan Yudi Pramuko, *Rahasia Sukses Dakwah Habib-FPI Gempur Playboy*. Tt: Yudi Pramuko, 2006.
- Rizieq Shihab, Muhammad. *Dialog FPI- Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta: Ibnu Saidah, 2008.
- Ritzen, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010).
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Modern Sociological Theory*. Jakarta: Kencana, 2006.
- B. Thompson, Jhon. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*, terj. Haqqul Yaqin. Yogyakarta: IRCiSoD,

2006.

- A. Coser, Lewis dan Douglas J. Gootman, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi: Ideologi, Pemikiran dan Gerakan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Huda, Alamul. "Epistemologi Gerakan Liberalis, Fundamentalis, dan Moderat Islam di Era Modern", *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2010).
- Salamah, Lilik. "Meninjau Kembali Konflik Perang Dingin: Liberalisme Vs Komunisme, *Jurnal Global dan Strategis*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2008).
- Zainal Muttaqin, Muhammad, "Ideologi: "Faktor Konflik dan Kegagalan Timur Tengah", *Nation State: Journal of Internasional*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2018).
- Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Demartoto, Argyo. "Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf", https://www.researchgate.net/publication/328980540_Teori_Konflik_Sebuah_Kajian_Menuju_Pemikiran_Ralf_Dahrendorf, Diakses pada 27 Desember 2021.
- M, Ali. Agusman. *Pengantar Konflik Sosial*. Jakarta: Pustaka Htizam, 2014.
- Soetopo. *Teori Konflik*. Jakarta: Grafindo Persada, 1999.
- Sarlito W, Sarwoko. *et al.*, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- M. Margareth, Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008.
- Baharudin, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Lentera, 2000.
- Hidayat, Imam. *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press, 2009.
- Rauf, Mswandi. *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: DIKTI, 2001.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Rosadi, Andi. *Hitam Putih FPI*. Jakarta Selatan: Nun Publisher, 2008.